

PEREKONOMIAN INDONESIA



MODUL

RIS HANDAYANI, SH., MM.

PEREKONOMIAN INDONESIA

RIS HANDAYANI, SH., MM.



Penerbit: STIE IPWIJA

PEREKONOMIAN INDONESIA

Penulis:

Ris Handayani, SH., MM.

Editor:

Yasmin Akari

Desain Cover dan Tata Letak:

Nanda Hidayati, S.Pd.I., M.Pd.

Penerbit:

STIE IPWIJA

JL. Letda Nasir No.

Cikeas Nagrak (Cibubur),

Gunung Putri Bogor

Tel. 021-8233737 Fax.021-8234224

www.stieipwija.ac.id

Cetakan Pertama, 01 April 2022

Hak cipta oleh Penulis dan Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 72.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga modul Perekonomian Indonesia telah dapat diselesaikan. Buku ini berisikan kumpulan materi perkuliahan Perekonomian Indonesia dalam satu semester.

Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A selaku Ketua Yayasan IPWIJA dan Ir. Besar Agung Martono, M.M., DBA. selaku Ketua STIE IPWIJA yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca dan dunia pendidikan.

Cikeas, 01 April 2022

Dosen
Perekonomian Indonesia

Ris Handayani, SH., MM.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| RUANG LINGKUP DAN KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN INDONESIA | 1 |
| A. MASALAH YANG MENYERTAI PEMBANGUNAN EKONOMI | 1 |
| B. KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN INDONESIA..... | 1 |
| C. PILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI | 5 |
| D. PERAN DAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH..... | 11 |
| SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA..... | 17 |
| A. PEREKONOMIAN INDONESIA DARI MASA KE MASA .. | 17 |
| B. MASA SEBELUM PENJAJAHAN (SEBELUM TAHUN 1600) | 17 |
| C. PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA | 40 |
| SISTEM EKONOMI INDONESIA | 43 |
| A. Definisi Sistem Ekonomi | 44 |
| B. Konsep Sistem Ekonomi..... | 47 |
| C. Fungsi Sistem Ekonomi | 50 |
| D. Komponen Sistem Ekonomi..... | 52 |
| E. Sistem Ekonomi dan Sistem Politik..... | 55 |
| PENDAPATAN NASIONAL | 59 |

| | |
|--|-----|
| A. Sejarah Pendapatan Nasional..... | 60 |
| B. PEMBAHASAN..... | 63 |
| KEBIJAKAN FISKAL | 81 |
| A. PEMBAHASAN..... | 82 |
| KEBIJAKAN MONETER | 105 |
| A. Pengertian Kebijakan Moneter..... | 106 |
| B. Jenis-jenis Kebijakan Moneter..... | 107 |
| C. Tujuan Kebijakan Moneter | 111 |
| D. Fungsi kebijakan Moneter | 113 |
| E. Penyebab Terjadinya Kebijakan Moneter | 116 |
| F. Kerangka kebijakan Moneter di Indonesia | 117 |
| G. Jalur Pembuatan Keputusan Kebijakan Moneter | 118 |
| H. Mekanisme Kebijakan Moneter | 119 |
| I. Jalur Mekanisme Kebijakan Moneter Paradigma Lama dan Paradigma Baru | 121 |
| J. Peran Bank Indonesia Terhadap Kebijakan Moneter..... | 127 |
| K. Hal-hal yang Perlu di Perhatikan Dalam Kebijakan Moneter | 128 |
| DAFTAR PUSTAKA | 131 |

RUANG LINGKUP DAN KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN INDONESIA

A. MASALAH YANG MENYERTAI PEMBANGUNAN EKONOMI

Tujuan pembangunan bukan hanya menginginkan adanya perubahan dalam arti peningkatan PDB tapi juga adanya perubahan struktur. Perubahann struktur ekonomi berkisar pada segi akumulasi (pengembangan sdp secara kuantitatif dan kualitatif), segi alokasi (pola penggunaan sdp), segi institusional (kelembagaan ekonomi dalam kehidupan masyarakat), segi distribusi (pola pembagian pendapatan nasional) (Soemitro Djojohadikusumo, 1993).

B. KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN INDONESIA

Indonesia sebagai negara kepulauan (nusantara) memiliki ciri-ciri khusus, yang berbeda dengan negara tetangga ASEAN, bahkan berbeda dengan negara-negara laindi dunia sehingga perekonomiannya memiliki karakteristik sendiri.

Yang mempengaruhi karakteristik perekonomian Indonesia :

1. Faktor geografi

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.677 pulau besar – kecil (baru 6.044 pulau memiliki nama, diantaranya 990 pulau yang dihuni manusia);

terbentang dari 60LU sampai 110LS sepanjang 61.146 km., memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda karena perbedaan SDA, SDM, kesuburan tanah, curah hujan (Sutjipto, 1975).

Wilayah Indonesia seluas 5.193.250 km², 70 persennya ($\pm 3,635,000$ km²) terdiri dari lautan (menjadi negara bahari) letaknya strategis karena : memiliki posisi silang (antara Benua Asia dan Benua Australia), menjadi jalur lalulintas dunia (antara Laut Atlantik dan Laut Pasifik) dan menjadi paru-paru dunia (memiliki hutan tropis terbesar).

Menghadapi kesulitan komunikasi dan transportasi antar pulau (daerah) baik untuk angkutan barang maupun penumpang; arus barang tidak lancar; perbedaan harga barang yang tajam; perbedaan kesempatan pendidikan dan kesempatan (lapangan) kerja; kesemuanya itu merupakan potensi kesenjangan.

2. Faktor Demografi

Indonesia negara nomor 4 di dunia karena berpenduduk lebih dari 310 juta orang. Penyebaran penduduk tidak merata (dua per tiga tinggal di P. Jawa), sebagian besar hidup di pedesaan (pertanian), bermata pencaharian sebagai petani kecil dan buruh tani dengan upah sangat rendah.

Mutu SDM rendah : $\pm 80\%$ angkatan kerja berpendidikan SD. Produktivitas rendah karena taraf hidup yang rendah: konsumsi rata-rata

penduduk Indonesia RP 82.226 per bulan (1993), namun 82% penduduk berpendapatan di bawah RP 60.000 per bulan per kapita (Sjahir, 1996).

Indonesia yang berpenduduk lebih dari 210 juta orang membutuhkan berbagai barang, jasa dan fasilitas hidup dalam ukuran serba besar (pangan, sandang, perumahan dan lain-lain). Namun dilain pihak kemampuan kita untuk memproduksi (produktivitasnya) rendah. Hal ini akan menciptakan kondisi munculnya rawan kemiskinan.

3. Faktor sosial, budaya dan politik

Sosial : Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku (heterogin) dengan beraagam budaya, adat istiadat, tata nilai, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Karena perbedaan latar belakang, pengetahuan dan kemampuan yang tidak sama, maka visi, persepsi, interpretasi dan reaksi (aksi) mereka terhadap isuisu yang sama bisa berbeda-beda, yang sering kali menimbulkan konflik sosial (SARA).

Budaya : Bangsa Indonesia memiliki banyak budaya daerah, tapi sebenarnya kita belum memiliki budaya nasional (kecuali bahasa Indonesia). Namun sebagai salah satu bangsa "Timur" (bangsa yang merdeka dan membangun ekonomi sejak akhir Perang Dunia II), mayoritas bangsa Indonesia sampai sekarang masih terpengaruh (menganut) "budaya" Timur, budaya

status orientation. Budaya status orientation bercirikan: semangat hidupnya mengejar pangkat, kedudukan, status (dengan simbol-simbol sosial); etos kerjanya lemah; senang bersantai-santai; tingkat disiplinnya rendah, kurang menghargai waktu (jam karet). Lawannya “budaya” barat, budaya achievement orientation dengan ciri-ciri sebaliknya.

Budaya status orientationn tidak produktif, konsumtif, suka pamer dan mudah memicu kecemburuan sosial.

Politik : sebelum kolonialis Belanda datang, bangsa Indonesia hidup di bawah kekuasaan raja-raja. Ratusan tahun bangsa Indonesia hidup di bawah pengaruh feodalisme dan kolonialisme. Ciri utama feodalisme antara lain adalah kultus individu (raja selalu diagungkan). Ciri utama kolonialisme antara lain adalah otoriter (laksana tuan terhadap budak).

Sisa-sisa pengaruh feodalisme (kultus individu) dan pengaruh kolonialisme (otoriter) sampai sekarang belum terkikis habis. Hal ini sangat terasa pada percaturan dan pergolakan politik di Indonesia. Perilaku yang kurang demokratis dari para elit politik dan perilaku kurang menghargai HAM dari para penguasa, menghambat kelancaran proses demokratisasi politik di Indonesia. Pada gilirannya hal ini menghambat terciptanya demokrasi ekonomi.

Dari uraian pengaruh faktor-faktor di atas dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia mengandung tiga potensi kerawanan.

Tiga potensi kerawanan yang menjadi karakteristik perekonomian Indonesia adalah:

- 1) Potensi rawan kesenjangan, terutama kesenjangan antara daerah (pulau). Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor geografi.
- 2) Potensi rawan kemiskinan, terutama kemiskinan di daerah pedesaan. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor demografi dan faktor budaya.
- 3) Potensi rawan perpecahan, terutama perpecahan antar suku, antar golongan (elit) politik. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor sosial-politik..

C. PILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

Strategi pembangunan dengan pertumbuhan terbukti gagal menyelesaikan persoalan-persoalan dasar pembangunan. Dalam kiprahnya strategi itu justru menciptakan persoalan-persoalan seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kesenjangan antar pelaku ekonomi (Budi Santoso, 1997).

Konsep pertumbuhan ekonomi menurut Boediono adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi bisa kita definisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang

menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1982).

Joseph Schumpeter membedakan dua latihan yaitu pertumbuhan ekonomi (growth) dan perkembangan ekonomi (development). Kedua-duanya adalah sumber dari peningkatan output masyarakat, tetapi masing-masing mempunyai sifat yang berbeda (Boediono, 1982).

1. Strategi Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth)

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau “teknologi” produksi itu sendiri.

Indonesia menganut strategi pertumbuhan ekonomi dan dalam melaksanakan pembangunan memakai Model Harrod Domar. Menurut kedua ekonomi ini, setiap penambahan stock kapital masyarakat (K) meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output (Q_p). di sini Q_p menunjukkan output yang potensial bisa dihasilkan dengan stock kapital (kapasitas produksi) yang ada.

- Hubungan K dan Qp

: $Qp = hK$ atau $1/h = K/Qp$

$1/h =$ Capital output ratio (COR)

$1/h =$ Incremental capital output ratio (ICOR)

koefisien ini menunjukkan untuk menghasilkan tambahan setiap unit output diperlukan berapa unit tambahan kapital (investasi)

Konsekuensi strategi pertumbuhan adalah bahwa besar kecilnya laju pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada naik turunnya tingkat investasi. Contoh : petro dollar (kelebihan harga minyak) pertumbuhan ekonomi melonjak drastis dari 2,5% (sebelum dimulai Pelita) menjadi 7,0% (selama Pelita I, II dan Pertengahan Pelita III). Tapi mulai pasca Oil Boom maka pertumbuhan ekonomi merosot sampai 2,5% (bersamaan resesi dunia tahun 1982) dan baru pulih kembali pada awal Pelita V mencapai 7,1% (1990).

Sejak krisis moneter pertengahan tahun 1997 dimana terjadi capital flight besar-besaran, pertumbuhan ekonomi merosot dengan cepat, masing-masing 8,5%, 6,8%, 2,5% dan 1,4% (untuk triwulan I, II, III, dan IV tahun 1997). Tahun 1998 pertumbuhan menjadi negatif.

2. Strategi Perkembangan Ekonomi (Economic Development)

Perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh entrepreneur (wiraswastaan). Inovasi menyangkut perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri, yang bersumber dari kreativitas para wiraswastawan.

Syarat-syarat terjadinya inovasi (perkembangan ekonomi)

- 1) Harus tersedia cukup calon-calon pelaku inovasi (entrepreneur) di masyarakat
- 2) Harus ada lingkungan sosial, politik dan teknologi yang bisa menjadi tempat subur bagi semangat inovasi
- 3) Harus ada cadangan atau suplai ide-ide baru secara cukup.
- 4) Harus ada sistem prekreditasi yang bisa menyediakan dana bagi para entrepreneur.

Ada lima kegiatan yang termasuk inovasi, yaitu :

- 1) Diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada.
- 2) Diperkenalkannya cara produksi baru, mesin baru
- 3) Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru.
- 4) Pembukaan daerah-daerah pasar baru

5) Perubahan organisasi industri sehingga meningkatkan efisiensi.

Disini ada perubahan sistem ekonomi sehingga dari waktu ke waktu kegiatan-kegiatan ekonomi berjalan maini efisien, yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada tingkat investasi.

3. Strategi Pembangunan Berwawasan Nusantara

Wawasan adalah pandangan hidup suatu bangsa yang dibentuk oleh kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan hidup bangsa Indonesia adalah pulau atau kepulauan yang terletak di antara samudera pasifik dan atlantik, di antara benua Asutralia dan Asia (Nusantara).

Pembangunan berwawasan nusantara sebenarnya tidak lain adalah pembangunan yang berwawasan ruang. Pembangunan berwawasan ruang (ekonomi regional) tersirat dalam argumentasi Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab daerah miskin kurang mampu berkembang secepat seperti yang terjadi di daerah yang lebih kaya (Suroso, 1994).

Dilihat dari dimensi ekonomi-regional, Indonesia menghadapi dilema dualisme teknologis, yakni perbedaan dan ketimpangann mengenai pola dan laju pertumbuhan di antara berbagai kawasan dalam batas wilayah satu negara. Dilema teknologis menonjol karena

adanya asimetri (ketidakserasian) antara lokasi penduduk dan lokasi sumber alam (Soemitro Djohadikusumo, 1993).

Menurut Laoede M. Kamaludin, penataan ruang di masa datang sebaiknya tidak hanya mengacu pada daratan, namun juga harus berorientasi pada penataan ruang kemaritiman. Sedikitnya terdapat tiga pendekatan yang dapat dikembangkan :

- 1) Pembangunan ekonomi berbasis teknologi tinggi, pusat pendidikan, jasa dan pariwisata. Ini tepat diterapkan di P. Jawa, Bali dan Batam.
- 2) Pembangunan ekonomi yang berbasis potensi kelautan. Ini lebih tepat dikembangkan di kawasan timur Indonesia dan kepulauan kecil di Sumatera.
- 3) Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya mineral dan tanaman industri dapat dikembangkan di pulau Sumatera (Kompas, 25-5-1999)

Mengapa pembangunan berwawasan nusantara penting. Seiring dengan makin berkembangnya dan makin membesarnya jumlah penduduk maka kita perlu memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk menggali persediaan bahan mentah dan sumber-sumber energi yang masih tersimpan banyak dalam flora dan fauna di lautan. Dalam waktu mendatang laut akan merupakan ladang utama dalam manusia

mencari bahan makanan dan keperluan hidup (Sutjipto, 1995).

Dua pertiga wilayah Indonesia berupa lautan. Sumber daya hayati Indonesia memiliki potensi lestari 4 juta ton dalam airlaut, 1,5 ton dalam air budidaya, 0,8 juta ton dalam air tawar (Kartili, J, A., 1983).

D. PERAN DAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

1. Peran Pemerintah

Peran atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian ada yang bersifat kuat (negara sosialis), ada yang lemah (negara kapitalis). Indonesia menganut sistem ekonomi campuran dengan mengutamakan berlangsungnya mekanisme pasar sepanjang tidak merugikan kepentingan rakyat banyak.

Campur tangan pemerintah dapat dibenarkan secara konstitusional :

- 1) Dari isi pembukaan UUD 1945 dengan Pancsilanya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah haruslah diarahkan untuk :
 - (a) Memajukan kesejahteraan umum
 - (b) Memajukan kecerdasan kehidupan bangsa
 - (c) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

- 2) Pasal 33 UUD 1945 bersama dengan pasal 34 dan pasal 27 ayat 2 mengandung amanat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial seluruh rakyat melalui :
 - (a) Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
 - (b) Penguasaan bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya.
 - (c) Pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar
 - (d) Penyediaan lapangan kerja

2. Kebijakan Pemerintah

Tujuan utama atau akhir kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Diukur secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat tercapai bila tingkat pendapatan riil rata-rata per kapita tinggi dengan distribusi pendapatan yang relatif merata. Tujuan ini tidak bisa tercapai hanya dengan kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga kebijakan non kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga kebijakan non ekonomi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ekonomi dan kebijakan non ekonom harus saling mendukung.

Klasifikasi kebijakan ekonomi menurut tingkat agregasi atau ruang lingkup pengaruh/ saran
KEBIJAKAN MAKRO

Selain itu kebijakan ekonomi mempunyai intermediate target sebelum mencapai tujuan akhir. Sasaran perantara tersebut mencakup lima hal utama :

- (1) Pertumbuhan ekonomi (misalnya PDB atau pendapatan nasional)
- (2) Distribusi pendapatan yang merata
- (3) Kesempatan kerja sepenuhnya
- (4) Stabilitas harga dan nilai tukar
- (5) Keseimbangan neraca pembayaran

Lima sasaran ini erat kaitannya dengan masalah stabilitas ekonomi.

Tiga macam kebijakan Ekonomi (menurut agregasinya) :

- (1) Kebijakan ekonomi mikro

Kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau disektor mana dan diwilayah mana perusahaan yang bersangkutan beroperasi.

Contohnya :

- (a) Peraturan pemerintah yang mempengaruhi pola hubungan kerja

(manajer dengan para pekerja), kondisi kerja dalam perusahaan.

- (b) Kebijakan kemitraan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil di semua sektor ekonomi
- (c) Kebijakan kredit bagi perusahaan kecil di semua sektor dan lain-lain.

(2) Kebijakan Ekonomi Meso

Kebijakan ekonomi sektoral atau kebijakan ekonomi regional. Kebijakan sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada sektor-sektor tertentu. setiap departemen mengeluarkan kebijakan sendiri untuk sektornya, seperti keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, ketenaga kerjaan dan sebagainya.

Kebijakan meso dalam arti regional adalah kebijakan ekonomi yang ditujukan pada wilayah tertentu. Misalnya kebijakan pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia (KTI), yang mencakup kebijakan industri regional, kebijakan investasi regional dan sebagainya. Kebijakan ini bisa dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

(3) Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan ini mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional, misalnya kebijakan uang ketat (kebijakan moneter).

Kebijakan makro ini bisa mempengaruhi kebijakan meso (sektoral atau regional), kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif.

Instrumen yang digunakan untuk kebijakan ekonomi makro adalah tarif pajak, jumlah pengeluaran pemerintah melalui APBN, ketetapan pemerintah dan intervensi langsung di pasar valuta untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah terhadap valas. (Tulus Tambunan, 1996).

Kebijakan ekonomi juga bisa dibedakan antara kebijakan ekonomi dalam negeri dan kebijakan ekonomi luar negeri.

a. Kebijakan Ekonomi dalam Negeri

- (1) Kebijakan sektor ekonomi, seperti pertanian, industri dan jasa-jasa
- (2) Kebijakan keuangan negara, seperti perpajakann, bea cukai, anggaran pemerintah (APBN).
- (3) Kebijakan moneter perbankan, seperti jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi, perkreditan, pembinaan dan pengawasan bank.
- (4) Kebijakan ketenagakerjaan, seperti penetapan upah minimum, hubungan kerja, jaminan sosial

(5) Kebijakan kelembagaan ekonomi, seperti BUMN, koperasi, perusahaan swasta, pemberdayaan golongan ekonomi lemah (UKM), dan lain-lain kebijakan.

b. Kebijakan hubungan ekonomi luar negeri

(1) Kebijakan neraca pembayaran, seperti pengamanan cadangan devisa negara.

(2) Kebijakan perdagangan LN, seperti tata-niaga (ekspor dan impor), perjanjian dagang antar negara.

(3) Kebijakan penanaman modal asing, seperti perizinan investasi langsung, investasi tidak langsung, usaha-usaha patungan.

(4) Kebijakan hutang LN, menyangkut hutang pemerintah, hutang swasta, perundingan/ perjanjian dengan para kreditor, dan lain-lain kebijakan.

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Sejarah perekonomian Indonesia merupakan suatu catatan penting untuk melihat bagaimana perkembangan Indonesia dalam perjalanan waktunya. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami berbagai dinamika seiring perputaran waktu. Hal ini relevan diungkapkan sebagai bagian untuk mengetahui realita perekonomian Indonesia.

A. PEREKONOMIAN INDONESIA DARI MASA KE MASA

Melihat dinamika perjalanan perekonomian Indonesia, maka pendekatan historis layak dikedepankan. Pendekatan ini tentu saja sejalan dengan rekap jejak perjalanan Bangsa Indonesia. Dengan demikian, aspek sejarah Indonesia sedikit banyak menjadi acuan bagi derap langkah perjalanan perekonomian Indonesia.

B. MASA SEBELUM PENJAJAHAN (SEBELUM TAHUN 1600)

Dinamika perekonomian Indonesia pada masa sebelum penjajahan dimulai dari jaman pra-sejarah sampai dengan masuknya kolonialisme di Indonesia, yaitu ketika Portugis masuk ke Indonesia (Maluku) pada abad 16. Atas dasar hal itu, maka dinamika perekonomian Indonesia sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui keberadaan kerajaan yang ada di nusantara. Beberapa kerajaan dalam perjalanan sejarah kehidupan Bangsa Indonesia di antaranya

adalah Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuna, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sunda, Kerajaan Bali (Listiani, 2009). Posisi geografis dimana pusat kerajaan berada ternyata beragam. Ada yang dipesisir pantai, ada yang di tepi laut. Hal itu berakibat pada keragaman corak aktivitas perekonomiannya.

Kerajaan Kutai terletak pada jalur perdagangan dan pelayaran antara Barat dan Timur, maka aktivitas perdagangan menjadi mata pencaharian utama, sehingga rakyat Kutai sudah mengenal perdagangan Internasional. Kerajaan Tarumanegara berada di daerah agraris, sehingga kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara adalah pertanian dan peternakan. Kerajaan Sriwijaya berada di pesisir utara Pulau Sumatera dan berada pada urat nadi perdagangan di Asia Tenggara sehingga masyarakat Sriwijaya menguasai perdagangan.

Kerajaan Mataram berada di bagian tengah Pulau Jawa. Posisi ini membuat masyarakat Mataram bertumpu pada sektor pertanian. Namun karena kondisi bumi Mataram tertutup dari dunia luar berakibat pada sulitnya untuk mengembangkan aktivitas perekonomian. Beberapa kerajaan yang berada di Jawa bagian Timur, juga menandakan aktivitasnya. Kehidupan ekonomi masyarakat pada jaman Kerajaan Singasari berbasis pada pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Kerajaan Majapahit hidup dari pertanian dan perdagangan.

Kerajaan Sunda berfokus pada kegiatan perdagangan dan pertanian yang merupakan kegiatan mayoritas rakyat Sunda. Selain Bertani, kehidupan masyarakat kerajaan Sunda juga berdagang. Kehidupan perekonomian masyarakat Kerajaan Bali Kuno bertumpu pada pertanian. Beberapa istilah yang berkaitan dengan bercocok tanam, anatara lain sawah, parlak (sawah kering), gaga (ladang), kebwan (kebun), dan kasuwakan (irigasi). Selain bercocok tanam, ada yang beberapa bekerja sektor di kerajinan.

Singkatnya, dalam masa sebelum penjajahan, perekonomian Indonesia bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Munculnya sektor perdagangan dalam aktivitas masyarakat pada jaman tersebut, menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak hanya berbasis pada sektor primer saja. Dengan demikian, cikal bakal sektor perekonomian yang lebih baik, sebenarnya telah dimulai pada masa tersebut.

1. Masa Penjajahan Portugis (1509-1659)

Perjalanan historis Portugis dalam menjajah Indonesia dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukan dalam tahun 1512. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba di kepulauan yang sekarang rempah-rempah yang berharga dan untuk memperluas usaha misionaris Katolik Roma. Upaya pertama Portugis untuk menguasai kepulauan Indonesia adalah dengan menyambut tawaran kerjasama dari Kerajaan Sunda.

Bangsa Portugis adalah bangsa yang mempunyai keahlian dalam navigasi, pembuatan kapal, dan persenjataan. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan ekspedisi dan ekspansi jauh ke negara-negara di dunia. Selain itu, bangsa Portugis adalah salah satu bangsa yang menjadikan perdagangan (khususnya rempah-rempah) menjadi komoditi ekonomi negaranya. Hal ini membuat perdagangan menjadi fokus bagi Portugis untuk membangun perekonomian. Banyak perjanjian-perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia dilakukan untuk mendapatkan komoditi perdagangan rempah-rempah.

Masa penjajahan Portugis memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan Portugis, kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak diwarnai adanya perlawanan dari rakyat terhadap Portugis, karena komoditi rempah-rempah yang menjadi andalan rakyat Indonesia dijarah begitu saja. Dengan demikian, kondisi perekonomian Indonesia berada dalam bayang-bayang Portugis. Sumber daya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat, menjadi bagian dari eksploitasi Portugis.

2. Masa Penjajahan Belanda (1602-1942)

Belanda masuk ke Indonesia kira-kira pada tahun 1602. Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang

tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur.

Penjajahan Belanda berlangsung kurang lebih selama 350 tahun, atau 3,5 abad. Masa yang sangat Panjang bagi Bangsa Indonesia dalam cengkeraman Belanda. Dalam rentang waktu tersebut berbagai kebijakan ekonomi dilakukan oleh Belanda. Dibentuknya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) adalah salah satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan Belanda. Dengan VOC tersebut segala otoritas perdagangan dikuasi Belanda. VOC benar-benar dibuat dalam rangka menguasai perdagangan, sehingga beberapa kewenangan dimilikinya, seperti mencetak uang, menyatakan perang dan damai, membuat Angkatan bersenjata sendiri, dan membuat perjanjian dengan raja-raja. Di sini terlihat betapa VOC mempunyai kekuasaan yang besar. Kewenangan itu seolah melegalkan keberadaan VOC sebagai penguasa Hindia Belanda.

Pada tahun 1795, VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda (Indonesia). Kegagalan itu Nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh : 1) Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar, 2) Penggunaan tantara sewaan membutuhkan biaya besar, 3) Korupsi yang

dilakukan pegawai VOC sendiri, 4) Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas deficit.

Bubarnya VOC bukan berarti Belanda kehilangan akal untuk mempertahankan dominasi penjajahannya. Justru muncul kebijakan baru yang disebut dengan cultuur stelsel (sistem tanam paksa). Kebijakan ini diberlakukan mulai tahun 1836 yang diinisiasi oleh Van Den Bosch.

Sistem tanam paksa berlangsung melalui aturan yang keras dan ketat. Tidak jarang masyarakat pribumi harus memeras keringat bahkan dengan cucuran darah mereka. Anehnya sistem ini juga ada sisi positifnya, yaitu masyarakat pribumi mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang ada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan pula membangkitkan perekonomian desa.

Setelah melakukan sistem tanam paksa, kemudian Belanda menerapkan Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal). Kebijakan ini dilakukan karena desakkan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi kearah yang lebih baik dengan mendorong pemerintah Belanda mengubah kebijakan ekonominya. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan munculnya beberapa peraturan-peraturan, seperti peraturan yang mengatur tentang sewa tanah, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan atau tidak. Kelihatannya sistem ini baik,

namun tetap saja menambah penderitaan bangsa Indonesia, terutama para tenaga kerja rendahan (kuli).

3. Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)

Kronologi penjajahan Jepang di Indonesia diawali pada bulan Juli 1942. Saat itu, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye public dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai memperoleh penghormatan dan Kaisar Jepang pada tahun 1943. Bulan Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, Soepomo membicarakan integrase nasional dan melawan indivisualisme perorangan. Sementara itu, Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia Belanda sebelum perang. Perjalanan waktu terus berputar, sehingga pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.

Kebijakan ekonomi pada jaman penjajagan Jepang, terdiri atas; 1) Perluasan Areal

Persawahan, 2) Pengawasan Pertanian dan Perkebunan.

Perluasan Areal Persawahan. Setelah menduduki Indonesia, Jepang melihat bahwa produksi beras tidak akan mampu memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian produksi pangan antara tahun 1941-1944 terus menurun.

Pengawasan Pertanian dan Perkebunan. Pelaksanaan pertanian diawasi secara ketat dengan tujuan untuk mengendalikan harga barang, terutama beras. Hasil pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 30% harus diserahkan ke lumbung desa. pelanggaran akan dihukum berat. Badan yang menangani masalah Ketentuan itu sangat merugikan petani dan yang berani melakukan pelanggaran disebut Kempetai (Korps Polisi Militer), suatu badan yang sangat ditakuti rakyat.

Pengawasan terhadap produksi perkebunan dilakukan secara Ketat. Jepang hanya mengizinkan dua jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina. Kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung dengan kepentingan perang. Sedangkan tembakau, teh, kopi harus dihentikan penanamannya karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Padahal, ketiga jenis tanaman itu sangat laku di pasaran dunia. Dengan demikian,

kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi sangat merugikan rakyat.

Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi telah mengakibatkan kehidupan rakyat Indonesia menjadi sengsara dan penuh penderitaan. Kondisi rakyat Indonesia selama pendudukan Jepang, jika dibandingkan dengan kondisi rakyat Indonesia ketika dijajah Belanda malah lebih buruk. Padahal Jepang menduduki Indonesia hanya tiga setengah tahun, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama tiga setengah abad.

4. Masa Order Lama (1945-1967)

Dinamika perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama menarik untuk dicermati. Hal ini terjadi karena pada masa tersebut, Indonesia adalah negara yang baru saja merdeka. Ibaratnya, sebagai negara yang baru merdeka maka berbagai fenomena muncul seiring dengan berlangsungnya kehidupan politik yang berlangsung pada saat itu. Dalam masa ini, perkembangan perekonomian dibagi dalam 3 (tiga) masa, yaitu: 1). Masa Kemerdekaan (1945-1950), 2). Masa Demokrasi Liberal (1950-1957), 3). Masa Demokrasi Terpimpin.

a. Masa Kemerdekaan (1945-1950)

Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan sangat tidak menggembarakan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu

mata uang secara tidak terkendali. Bulan Oktober 1946 Pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blockade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Akibatnya negara berada dalam kondisi krisis keuangan. Kondisi tentu membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada masa itu.

Menghadapi krisis tersebut, tidak ada jalan lain bagi pemerintah, kecuali harus segera menempuh beberapa kebijakan, yaitu pinjaman nasional, memenuhi kebutuhan rakyat, melakukan konferensi ekonomi, membuat rencana pembangunan, membangun partisipasi swasta dalam pembangunan ekonomi, dan nasionalisasi Bank Indonesia.

Pinjaman Nasional dilakukan oleh Menteri keuangan (kala itu Ir. Soerachman) dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun. Pinjaman ini dimaksudkan agar tersedia dana segar bagi operasionalisasi penyelenggaraan negara. Untuk memenuhi kebetuhan rakyat, dilakukan dengan mendatangkan Kapal Martin Behrman di pelabuhan Ciberon yang mengangkut kebutuhan rakyat.

Pembahasan mengenai peningkatan hasil produksi pangan distribusi bahan makanan, sandang, serta status administrasi perkebunan asing dilakukan melalui konferensi ekonomi. Kemudian untuk melengkapinya dibuat Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan), dimana dalam dokumen itu meliputi anjuran memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanam tanah terlantar di Sumatra dan mengadakan transmigrasi.

Pada masa tersebut, pemerintah telah menyadari bahwa jika hanya pemerintah sendiri yang bekerja, maka pekerjaan pemerintah akan menjadi lebih berat. Untuk itu pemerintah berusaha menggandeng swasta dalam membangun perekonomian, dengan mengaktifkan dan mengajak partisipasi swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal kemerdekaan. Kemudian dilanjutkan dengan Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia, yang hingga sekarang ini menjadi Bank Indonesia.

Selain kebijakan di atas, muncul pula kebijakan yang dikenal dengan sebutan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng dan Sistem Ekonomi Ali-Baba.

Sistem Ekonomi Gerakan Banteng merupakan kebijakan yang digagas oleh Soemitro Djojohadikusumo". Sistem ini

dimaksudkan untuk perbaikan dan perubahan struktur ekonomi peninggalan Belanda ke arah ekonomi nasional melalui gerakan konfrontasi ekonomi. Tujuannya melindungi para pengusaha pribumi dari persaingan non pribumi. Setelah kabinet Natsir jatuh, sistem ini dilanjutkan oleh Kabinet Sukiman melalui menteri keuangannya Jusuf Wibisono dengan kebijakannya pemberian kredit pada pengusaha pribumi. Namun kebijakan ini akhirnya gagal. Sistem Ekonomi Ali Baba merupakan penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha nonpribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan kepada pengusaha pribumi. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi pengusaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sistem ini berlaku pada kabinet Ali Sastroamijoyo-I.

Kondisi perekonomian pada masa ini lebih banyak berkutat pada bagaimana menyelesaikan persoalan ekonomi dasar. Namun hal inipun juga tidak bisa berjalan dengan baik, akibat situasi politik yang tidak stabil. Beberapa kebijakan sebenarnya telah didisain dengan baik, namun ketika diimplementasikan tidak jalan. Tentu saja tidak bisa memperbaiki kondisi perekonomian pada masa itu.

b. Masa Demokrasi Liberal (1959-1957)

Masa ini, paham liberalisme mulai masuk dalam kebijakan perekonomian Indonesia. Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Hal ini kemudian membuat pada masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar. Kebijakan ini sebenarnya belum tepat benar, karena pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun akibat pengaruh eksternal, masa kebijakan ini tetap berjalan. Dampak dari kebijakan ini akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.

Pada masa itu pemerintah terkesan memaksakan sistem pasar dalam perekonomian. Anehnya pemerintah juga sudah mengetahui dampaknya, maka pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi perekonomian. Usaha-usaha tersebut adalah melalui pemotongan nilai uang, selanjutnya program Benteng, dan memutuskan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).

Pemotongan nilai uang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, agar tingkat harga turun. Program ini dikenal dengan sebutan Gunting Syarifuddin. Pemerintah juga melanjutkan program Benteng

(Kabinet Natsir) dengan maksud untuk menumbuhkan wiraswasta pribadi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Serta pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

c. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Demokrasi terpimpin tidak lepas dari sosok Presiden Soekarno, sehingga pemikiran Soekarno menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi di pimpin. Pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin muncul pertama kali pada pidato yang berjudul Kembali ke Rel Revolusi (1959). Dalam pidatonya tersebut Soekarno menyatakan bahwa kita dapat mempergunakan sistem yang sudah-sudah dan alat-alat yang sudah-sudah. Sistem Liberalisme harus dibuang jauh-jauh, demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin harus ditempatkan sebagai gantinya.

Akhirnya demokrasi terpimpin benar-benar terjadi setelah muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Konsekuensi dari sistem ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akhirnya cenderung berjalan melalui sistem etatisme, dimana dalam sistem ini negara dan aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta memastikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

Masa ini tidak menunjukkan kondisi perekonomian yang baik, justru berdampak pada adanya devaluasi, perlunya membentuk Lembaga ekonomi, dan kegagalan dalam bidang moneter. Devaluasi berarti menurunkan nilai uang. Tujuannya guna membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta agar dapat meningkatkan nilai rupiah, sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Pada saat itu mata uang Rp 1.000,00 dan Rp 1.500,00 menjadi Rp 50,00. Pada saat itu dibentuk pula apa yang disebut dengan Deklarasi Ekonomi, yang bertujuan untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

5. Masa Orde Baru (1967-2008)

Masa Orde Baru identik dengan masa pemerintahan Presiden Suharto. Pada masa ini dikenal dengan beberapa tahapan pembangunan yang menjadi agendanya. Namun proses perjalanan Orde Baru juga penuh dengan dinamika, sehingga kondisi perjalanan perekonomian juga seiring dengannya.

Order baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada otoritas stabilitas ekonomi dan politik. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Berkaca pada masa sebelumnya, dimana ketika sistem ekonomi liberal diterapkan ternyata berdampak pada kegagalan pengusaha pribumi

dalam bersaing dengan pengusaha non pribumi, maka pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang baru melalui pendekatan demokrasi Pancasila, dan secara perlahan campur tangan pemerintah dalam perekonomian mulai masuk. Nampak ajaran Keynes mulai merasuki pemikiran pengambil kebijakan Negara.

Pentingnya aspek pemerataan, tampaknya disadari betul dalam masa itu, sehingga muncul istilah 8 (delapan) jalur pemerataan sebagai basis kebijakan ekonominya. Kedelapan jalur tersebut adalah: 1) Kebutuhan pokok, 2) Pendidikan dan kesehatan, 3) Pembagian pendapatan, 4) Kesempatan kerja, 5) Kesempatan berusaha, 6) Partisipasi wanita dan generasi muda, 7) Penyebaran pembangunan, 8) Peradilan.

Pelita menunjukkan hasil yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi, terbukti pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan sektor industri. Selain itu, terdapat pula keberhasilan dalam mengendalikan jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB). Akan tetapi, apa yang telah menjadi capaian di atas, ternyata muncul sisi negatif yang menjadi fakta untuk dicermati. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup, kerusakan sumber daya alam, ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, ketimpangan antar golongan pekerjaan, serta

akumulasi utang luar negeri yang semakin menumpuk. Muncul pula konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Meskipun Order Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi justru rapuh. Hal ini terbukti, ketika dunia dilanda krisis global pada tahun 1998, Indonesia merasakan dampak yang luar biasa. Harga-harga meningkat secara drastis dan sulit dikendalikan, rupiah tidak berharga dalam perdagangan internasional, dan banyak perusahaan berskala besar bangkrut. Titik kulminasi keterpurukan Orde Baru, akhirnya berujung pada mundurnya Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

6. Masa Reformasi (1998-sekarang)

Masa Reformasi dianggap sebagai tonggak baru perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, baik dari sisi sosial dan politik. Pada masa ini muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi perjalanan bangsa Indonesia kedepan. Kebijakan yang paling menonjol adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintahan dan yang semua sentralistis, menjadi desentralistis. Kebijakan dengan Otonomi daerah, yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004.

a. Masa Presiden BJ. Habibie (21 Mei 1998 s/d 20 Oktober 1999)

Habibie adalah Wakil Presiden ketika Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden ketujuh. Namun ketika Soeharto lengser konstitusi Habibie yang menggantikannya. Habibie inilah boleh dikata sebagai awal Orde Reformasi, meski masih sebagai bagian dari Soeharto. Perdebatan tentang siapa sebenarnya yang mengawali reformasi masih ada hingga sekarang. Namun jika kita mengaca pada perjalanan sejarah awal bergulirnya reformasi, nampak bahwa reformasi yang dimaksud adalah lengsernya SPeharto dari kursi presiden. Nah ketika Soeharto telah benar-benar turun, maka tentu saja penggantinya layak disebut sebagai pemimpin baru yang reformis.

Habibie mewarisi kondisi kekacauan pasca pengunduran diri Soeharto akibat salah urus pada masa Order Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan Presiden Habibie segera membentuk sebuah cabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi.

Habibie melakukan beberapa kebijakan, baik dalam bidang politik, sosial, maupun keamanan, di bidang ekonomi, Habibie berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar dalam kisaran antara

Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6.500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian.

- b. Masa Presiden Abdurrahman Wahid/Gus Dur (20 Oktober 1999 s/d 23 Juli 2001)

Perekonomian kala itu buruh perhatian serius dalam penanganannya, salah satunya sektor moneter. Menyadari berapa beratnya mengelola sektor moneter, maka untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi Nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto Tjakrawerdya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indrawati.

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga

yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.

2. Hubungan pemerintahan dibawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.
 3. Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal Indonesia
 4. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.
- c. Masa Presiden Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001 s/d 20 Oktober 2004)

Pemerintah Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gus Dur. Hal itu ditunjukkan dengan adanya inflasi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri maupun swasta. Selain itu, nilai tukar rupiah yang

masih fluktuatif, dan indeks harga saham gabungan yang cenderung menurun.

Salah satu masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, kebijakan yang dilakukan adalah meminta penundaan utang sebesar US\$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 Trilliun. Megawati juga berhasil memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002 nilai ekspor mencapai US\$ 57,158 miliar dan import tercatat US\$ 31,229 miliar. Pada tahun 2003 ekspor juga menanjak ke angka US\$61,02 miliar dan import meningkat ke angka US\$32,39 miliar. Untuk krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar US\$ 930, dan menurunkan kurs mata uang rupiah menjadi Rp 8.500,00. Untuk mengatasi korupsi, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, perekonomian Indonesia mulai mengalami kemajuan. Pemerintah dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi mejadi 4,1%, karena pada saat itu pemerintah membuat kebijakan privatisasi BUMN, yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual kepada perusahaan asing.

d. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 s/d 2014)

Susilo Bambang Yudhoyono, atau lebih dikenal dengan sebutan SBY, merupakan presiden pertama yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilu tahun 2004 dan tahun 2009. Periode pertama dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, sedangkan pada periode kedua dilantik pada 20 Oktober 2009 dengan Wakil Presiden Boediono. Pada masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti gelombang tsunami, gempa bumi, banjir, dan tanah longsong. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Terdapat dua kebijakan yang dianggap kontroversial, yaitu : 1) Kebijakan mengurangi subsidi BBM, 2) Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kebijakan mengurangi subsidi BBM, dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor Pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara kebijakan BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial.

Perkembangan dalam sektor utang luar negeri juga menggembirakan. Pada pertengahan bulan Oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dollar AS. Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Dengan sudah tidak berada dalam “cengkeraman” IMF, maka Indonesia akan lebih leluasa dalam menentukan kebijakannya.

Masa ini juga ditandai dengan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4%, angka mendekati target 6,6%. Namun, tingkat inflasi mencapai 8,7% yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005, dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 2005. Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%.

Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh signifikan seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY

telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.

Masih ada kebijakan-kebijakan lain dalam bidang ekonomi, seperti: pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB, pembelian kembali saham BUMN, pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil, memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, meningkatkan sektor pariwisata dengan mencanangkan Visit Indonesia 2008, pemberian bibit unggul pada petani.

Era SBY meninggalkan beberapa masalah yaitu implementasi pembangunan ekonomi terkesan seadanya, karena tidak (atau barangkali belum) muncul strategi yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pengangguran dan kemiskinan yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan.

C. PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA

Melihat rekaman kondisi perekonomian tersebut, kita tentu bertanya, bagaimana prospek perekonomian Indonesia kedepan?, pertanyaan ini muncul di tengah situasi ekonomi dunia yang masih belum stabil.

Menurut Ratnawaty (2012)²⁶, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan masih akan diuntungkan oleh konsumsi domestik yang cukup besar. Dalam sektor investasi, menurut Wirjawan (2010)⁷, prospek pertumbuhan investasi Indonesia

pada 2010 dinilai cukup positif, karena Indonesia akan menerapkan kebijakan yang memudahkan dan memberikan kenyamanan investor dalam melakukan investasi. Hal senada disampaikan oleh Dapice (2012)", prospek perekonomian Indonesia dinilai masih yang terbaik di kawasan Asia Tenggara, persentase investasi asing terhadap PDB Indonesia paling kecil, yakni hanya sekitar 7 persen. Vietnam mendekati 10 persen, Thailand 12 persen, serta Malaysia dan Filipina di atas 15 persen. Investasi asing karena Tangsung dan portofolio kapital sangat membantu pertumbuhan negara-negara ASEAN. Tapi, saat krisis seperti arus investasl langsung akan melambat.

Kondisi moneter dan beberapa sektoral Indonesia juga menjadi modal perekonomian. Menurut Juoro dan Sugema (2011)", hal ini terlihat dari stabilitas ekonomi terjaga baik dalam jangka menengah, inflasi rendah, suku bunga dapat diturunkan, dan nilai rupiah cenderung menguat. Pada perekonomian jangka menengah secara sektoral pertumbuhan tinggi pada sektor non-tarded seperti telekomunikasi, perumahan, dan keuangan. Sementara, sektor traded seperti industri manufaktur, pertanian, dan pertambangan butuh revitalisasi.

Bab ini menuntun kita untuk menyadari bahwa waktu dapat mempengaruhi perjalanan kondisi perekonomian. Perjalanan waktu yang diiringi dengan perubahan dinamika, baik sosial dan politik, ternyata memberikan kontribusi pada kebijakan yang

dihasilkan pada periode masing-masing pemerintah. Ada kesan belum ada keberlanjutan secara menyeluruh terhadap kebijakan dari periode pemerintahan sebelumnya. Namun di tengah realita seperti terurai di bab ini, ternyata Indonesia masih mempunyai harapan terhadap kondisi perekonomian. Prospek ekonomi Indonesia ternyata didukung oleh kondisi yang signifikan, baik dari sisi mikro dan makro, serta sektoral, Hal ini membawa optimisme bagi perkembangan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

SISTEM EKONOMI INDONESIA

Dalam sejarah perkembangan masyarakat terdapat berbagai sistem ekonomi yang berlaku. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda, di mana secara garis besar sistem ekonomi ditentukan oleh kepemilikan alat produksi. Kegiatan perekonomian bisa berlangsung karena ada sebuah sistem ekonomi yang mengatur keseluruhan kegiatan. Membangun sistem ekonomi bukan perkara yang mudah dan oleh karenanya tidak mungkin dilakukan secara instan. Proses itu memerlukan sebuah usaha yang keras dan berjenjang karena sistem ekonomi bukan konsep teknis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat pragmatis. Tetapi, sistem ekonomi adalah sebuah konsep teknis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan ekonomi yang sejalan dengan landasan ideologis masyarakatnya (Shadr, 2008).

Dalam membangun sistem ekonomi sangat membutuhkan proses dan rangkaian yang panjang, maka diperlukan tahapan yang berseri, dari tahap awal sampai tahap akhir, hingga akhirnya tercipta sistem ekonomi tersebut. Perekonomian suatu masyarakat atau bangsa tidaklah muncul demikian aja. Ia merupakan hasil pikiran dan kerja keras dari seluruh komponen masyarakat atau bangsa yang bersangkutan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya ekonomi yang mereka miliki.

Di Indonesia, sejak awal-awal kemerdekaan, sistem ekonomi selalu menjadi topik diskusi yang hangat

dan menarik dalam berbagai kesempatan. Diskusi-diskusi itu pada umumnya diselenggarakan dalam rangka menemukan sistem ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sampai akhir 1980-an, diskusi itu berjalan sangat intensif dengan melibatkan para pakar dan praktisi dari berbagai kalangan. Hasilnya, beberapa penafsiran tentang sistem ekonomi Indonesia sudah ditawarkan. Sayangnya, diskusi semacam itu mulai memudar sejak awal 1990-an, seiring dengan semakin mapannya posisi rezim Orde Baru, dan semakin kuatnya pengaruh sistem ekonomi liberal dalam perekonomian (Ismail et al, 2020). Dalam buku pada bab ini akan diuraikan definisi dan komponen-komponen dalam sistem ekonomi yang merupakan landasan awal dari rangkaian bab-bab selanjutnya.

A. Definisi Sistem Ekonomi

Arti kata “Sistem” dalam Webster’s New Collegiate Dictionary sebagai “a regulary interacting or interdependent group of items forming a unified whole”. Definisi tersebut secara bebas dapat diartikan sebagai kesatuan item (sub-sistem) yang berinteraksi atau tergantung satu sama lain dalam membentuk suatu kesatuan yang utuh. Selain itu ada definisi lain yang mengatakan bahwa sistem merupakan “hubungan yang khas yang diidentifikasi yang sifatnya harmonis dan terpadu dalam suatu struktur organisasi. Sebuah sistem bukan sekedar himpunan suatu subyek (kumpulan orang atau masyarakat), himpunan suatu obyek (kumpulan dokumen atau arsip), bukan pula himpunan norma (undang-undang atau peraturan kepegawaian) atau kumpulan

organisasi. Sebuah sistem merupakan jalinan semua himpunan-himpunan yang mencakup subyek atau obyek dan perangkat kelembagaan yang membentuknya.

Sistem ekonomi memiliki pengertian yang sangat luas, namun ia tidak bisa lepas dari terminologi sistem itu sendiri. Secara umum, sistem adalah suatu kesatuan yang sifatnya menyeluruh, di dalamnya terdapat bagian-bagian yang memiliki ciri-ciri sendiri, dan antar bagian-bagian memiliki keterkaitan yang saling mendukung sehingga membentuk mekanisme kerja yang menyatu.

Dengan demikian, sistem adalah suatu bangunan atau entitas yang tersusun dari sub-sub sistem yang saling berkaitan sehingga membentuk pola kerja yang holistik (Ismail et al, 2020).

Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan. Sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi. Gilarso (1992), menyampaikan bahwa sistem ekonomi adalah seluruh tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat mencakup produsen, konsumen, pemerintah, bank dan lainnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi dan konsumsi maupun investasi yang membentuk suatu kesatuan utuh yang teratur dan dinamis sehingga mampu menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Sedangkan menurut McEachern

(2001) sistem ekonomi adalah seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (Suleman, Abdul Rahman et al, 2021).

Beberapa ahli menuturkan pendapatnya tentang pengertian sistem ekonomi, di antaranya Sheridan (1998), menyatakan bahwa sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. Sanusi (2000), memberikan pengertian bahwa sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata (ekonomi, sosial, politik, ide-ide) yang saling memengaruhi satu dengan yang lainnya yang ditujukan ke arah pemecahan problem-problem, produksi, distribusi, konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian (Munthe et al, 2021).

Menurut Dumairy (1997), sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu supra sistem kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu negara.

Menurut Sattar (2018), sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi Antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.

Berdasarkan berbagai macam pemaparan mengenai sistem ekonomi dari berbagai sumber maka dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi kenegaraan dari negara itu sendiri. Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan setiap negara memiliki ideologi, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, serta kondisi sumber daya alam yang berbeda-beda. Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Munthe et al, 2021).

B. Konsep Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi merupakan keseluruhan dari berbagai institusi ekonomi yang berlaku di suatu perekonomian untuk mengatur bagaimana sumber daya ekonomi yang terdapat di perekonomian tersebut didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Berbagai institusi ekonomi ini mengatur bagaimana dibuatnya keputusan yang menyangkut hal-hwal ekonomi dan bagaimana sumber daya ekonomi dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai institusi ekonomi ini dapat berupa peraturan perundang-undangan ataupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut dalam penggunaan sumber daya

ekonominya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Sebagai hasil kemufakatan suatu masyarakat/negara, maka kerangka institusi ekonomi yang berlaku biasanya tidak bersifat statis. Kemufakatan yang tercapai suatu saat biasanya didasarkan atas perkembangan aspirasi dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Karena isu-isu dan masalah yang dihadapi terus berkembang maka nilai dan aspirasi dari masyarakat itu akan cenderung ikut berubah. Dengan berubahnya aspirasi dan sistem nilai ini maka suatu sistem ekonomi yang berlaku akan cenderung ikut berubah dan berevolusi. Suatu ilustrasi dari perkembangan ini adalah GBHN yang telah diberlakukan setiap lima tahun di Indonesia sejak tahun 1973 dan terakhir pada tahun 1998. Pengamatan atas perkembangan GBHN dari suatu periode lima tahun ke lima tahun berikutnya menunjukkan adanya kecenderungan berubah, yaitu tidak statis.

Suatu hal yang juga perlu dicatat adalah walaupun dapat terbentuk berbagai sistem ekonomi yang berbeda, setiap dan semua sistem ekonomi tersebut tidak dapat menghindarkan diri dari berbagai kaidah yang berlaku di ilmu ekonomi. Satu kaidah ekonomi mikro adalah hukum permintaan dan penawaran, dalam mana harga suatu barang atau jasa tidak dapat tetap rendah jikalau permintaan meningkat sedangkan penawarannya tidak ikut meningkat. Dalam sistem ekonomi yang diatur pemerintah, harga ini dapat tetap rendah tetapi harus

disertai dengan adanya subsidi. Suatu kaidah ekonomi pada tataran makro adalah bahwa kebijakan fiskal pemerintah jikalau tidak dapat berimbang harus ditutupi oleh pinjaman luar negeri kecuali ditingkatkan pajak atau/dan ditingkatkan jumlah uang beredar dari segi kebijakan moneter. Kedua contoh berlakunya hukum ekonomi ini dan implikasinya (dalam contoh: perlunya subsidi dan perlunya pinjaman luar negeri atau/dan inflasi yang lebih tinggi) menunjukkan bahwa masalah pembangunan ekonomi yang semakin banyak dapat terselesaikan pada tataran sistem ekonomi, melalui berlakunya berbagai kaidah ekonomi, akan semakin mengurangi permasalahan yang harus diselesaikan pada tataran sistem politik.

Sistem ekonomi dalam sebuah negara dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal negara tersebut. Faktor internal yang memengaruhi seperti lokasi geografi, jumlah penduduk, sumber daya alam, dan kualitas sumber daya manusia negara tersebut. Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi sistem ekonomi negara tersebut seperti kondisi politik, sistem pemerintahan, sosial dan budaya, dan perkembangan teknologi yang digunakan. Pengelolaan ekonomi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta tergantung pada karakteristik maupun sejarah dari bangsa tersebut. Perbedaan sistem perekonomian suatu negara dengan negara lain juga dapat dilihat dari (a) kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, (b) kebebasan masyarakat untuk berkompetisi, dan (c) peran pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi (Suleman et al, 2021).

C. Fungsi Sistem Ekonomi

Pada umumnya dalam mencapai tujuannya, menurut (Lampert, 1994) sistem ekonomi dapat memerankan dua fungsi, yaitu:

1. Menjalankan Perekonomian Nasional

Dalam kegiatan perekonomian di suatu negara selalu melibatkan pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki kepentingan yang saling terkait. Meskipun jumlahnya sangat banyak, namun dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok saja, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Pemerintah di satu sisi melalui lembaga- lembaga sebagai konsumen yang melakukan kegiatan membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Di sisi lain, pemerintah juga menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian seperti jalan, jembatan, keamanan, dan sebagainya. Jadi pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen.

Perekonomian bekerja tidak hanya digerakkan oleh pelaku domestik. Pelaku-pelaku ekonomi luar negeri juga memiliki peran yang besar dalam memengaruhi jalannya perekonomian nasional. Pelaku ekonomi domestik membutuhkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku luar negeri. Sebaliknya, pelaku ekonomi luar negeri membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Jadi fungsi dasar dari sistem ekonomi adalah menjaga dan mengarahkan agar perekonomian nasional yang melibatkan banyak

pelaku ekonomi yang memiliki kepentingan yang saling terkait menuju pada terwujudnya tujuan nasional.

2. Mengkoordinasikan Kegiatan Ekonomi

Dalam kaidah ekonomi yang sudah umum, sumber daya yang dimiliki relatif terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan yang ingin dicapai. Tujuan penting dari hal tersebut adalah agar penggunaan sumber daya ekonomi dilaksanakan dengan cara yang sebaik mungkin. Di samping itu, alokasi sumber daya harus memiliki keterkaitan dengan skala prioritas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Aktivitas perekonomian membutuhkan koordinasi untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya, baik secara sektoral/regional maupun secara keseluruhan/nasional, baik antara masyarakat lapis bawah maupun lapisan menengah dan atas, baik keseimbangan saat ini maupun keseimbangan masa depan. Koordinasi juga dibutuhkan untuk menyeimbangkan antara kaidah efisiensi dan equity. Kaidah efisiensi sangat krusial dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang cepat. Sedangkan kaidah equity dibutuhkan untuk menjamin distribusi pendapatan yang merata. Equity dan efisiensi tidak selamanya bertentangan dan pengalaman negara lain sudah membuktikannya. Ini semua tergantung dari kualitas koordinasi yang diimplementasikan (Ismail et al, 2020).

D. Komponen Sistem Ekonomi

Menurut Ismail et al, (2020), secara sederhana elemen pokok dari sistem ekonomi ada 4 (empat), yaitu:

1. Kepemilikan sumber daya

Sumber daya merupakan unsur penting dalam sistem ekonomi karena setiap kegiatan ekonomi melibatkan sumber daya. Setiap kegiatan ekonomi, baik kegiatan konsumsi, produksi, maupun kegiatan pertukaran sumber daya sangat dibutuhkan sekali. Maka daripada itu kepemilikan sumber daya menjadi sangat penting dalam sistem ekonomi. Dengan kata lain, setiap sistem ekonomi harus memiliki tatanan yang tegas tentang kepemilikan sumber daya. Sebelum kegiatan ekonomi diselenggarakan, masalah kepemilikan harus sudah terselesaikan. Sebab, kejelasan dan kepastian atas kepemilikan akan membawa implikasi kepada kejelasan dan kepastian klaim pendapatan atau klaim sumber daya dari pihak lain, seperti upah, sewa, bunga, dan profit.

2. Pelaku ekonomi

Sistem ekonomi hanya akan berfungsi jika ada partisipannya (pelakunya). Partisipan menjadi bagian penting dari sistem ekonomi, sebab terselenggaranya kegiatan ekonomi digerakkan oleh para pelakunya. Tinggi rendahnya frekuensi aktivitas para pelaku ekonomi akan menentukan baik buruknya kinerja perekonomian. Tanpa kegiatan ekonomi, perekonomian akan statis. Pada

dasarnya partisipan (pelaku ekonomi) adalah orang. Sebagai pelaku ekonomi, pelaku bisa berbentuk rumah tangga, perusahaan, pemerintah, negara, asosiasi, koperasi, dan sebagainya. Dilihat dari statusnya, pelaku ekonomi itu bisa berbentuk swasta, koperasi, publik/negara, atau gabungan dari semua itu. Semua partisipan (pelaku ekonomi) yang terlibat dalam kegiatan ekonomi memiliki tujuan dan preferensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, agar perekonomian yang digerakkan oleh para pelaku ekonomi itu menuju sasaran yang diinginkan, maka partisipan dalam sistem ekonomi harus diatur. Disinilah pentingnya tatanan mengenai pelaku ekonomi

3. Mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi

Proses atau mekanisme bekerja bukan objek atau entitas fisik seperti halnya partisipan atau sumber daya, melainkan merupakan aturan main untuk melakukan aktivitas bagi para partisipan untuk berperan dalam perekonomian. Bagi sebuah perekonomian, elemen proses menjadi krusial karena akan berdampak langsung terhadap kualitas kinerja sistem ekonomi. Semua berharap agar setiap proses kegiatan ekonomi memberikan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, pembagian dan pengaturan tentang penyelenggaraan kegiatan ekonomi menjadi elemen yang sangat penting dalam sistem ekonomi. Secara garis besar, ada dua alternatif pilihan bagaimana perekonomian itu diselenggarakan. Dalam sistem kapitalis murni, diserahkan kepada mekanisme pasar atau

kekuatan permintaan dan penawaran. Kondisi sebaliknya terjadi pada sistem ekonomi perencanaan terpusat, di mana kegiatan ekonomi didasarkan pada perencanaan yang dibuat oleh negara, sehingga pelaku ekonomi tidak memiliki kekuasaan menetapkan dan memutuskan kepentingan masing-masing.

4. Tujuan yang ingin dicapai

Tujuan akhir dari semua sistem ekonomi pada dasarnya sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bisa saja sistem ekonomi kapitalis dan sosialis memiliki tatanan yang berbeda mengenai kepemilikan dan proses penyelenggaraan ekonomi, namun keduanya memiliki tujuan yang sama yakni mewujudkan kesejahteraan. Hanya saja, karena nilai-nilai dasarnya berbeda, maka ukuran dan definisi kesejahteraan dari dua sistem ekonomi tersebut sangat berbeda. Ekonomi kapitalis lebih menekankan pada kesejahteraan individu, sedangkan ekonomi sosialis lebih menekankan pada kesejahteraan kolektif/bersama.

Sanusi (2000), mengatakan bahwa terdapat tujuh elemen penting dari sistem ekonomi, di antaranya: (1) Lembaga-lembaga ekonomi, (2) Sumber daya ekonomi, (3) Faktor-faktor produksi, (4) Lingkungan ekonomi, (5) Organisasi dan manajemen, (6) Motivasi dan perilaku pengambilan keputusan atau pemain dalam sistem itu; dan (7) Proses pengambilan keputusan.

Setiap sistem ekonomi menurut Sanusi (2000), dipengaruhi oleh sejumlah kekuatan, di antaranya adalah:

1. Sumber-sumber sejarah, kultur/tradisi, cita-cita, keinginan, dan sikap masyarakat.
2. Sumber daya alam termasuk iklim.
3. Filsafat yang dimiliki dan yang dibela oleh sebagian besar
4. Masyarakat;
5. Mencapai cita-cita/keinginan serta tujuan dan sasaran yang dipilih;
6. Trials dan errors atau uji coba yang dilakukan masyarakat dalam usaha mencari alat-alat ekonomi.

E. Sistem Ekonomi dan Sistem Politik

Teori sistem ekonomi adalah teori yang mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Persoalan-persoalan ekonomi pada hakikatnya adalah masalah transformasi atau pengolahan alat-alat/sumber pemenuh/pemuas kebutuhan, yang berupa faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam dan keterampilan (skill) menjadi barang dan jasa (Subandi, 2018).

Dumairy (2016) mengatakan bahwa sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam supra sistem kehidupan masyarakat. Sistem

ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu negara. Untuk itu tidak mengherankan bila dalam perjalanan atau penerapan suatu sistem ekonomi tertentu pada suatu negara terjadi benturan, konflik, atau bahkan tantangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Pelaksanaan sistem ekonomi tertentu akan berjalan mulus jika (hanya jika) lingkungan kelembagaan masyarakatnya mendukung. Sebagai supra sistem kehidupan, sistem ekonomi berkaitan erat dengan sistem sosial lain yang berlangsung di dalam masyarakat.

Di dunia ini terdapat kecenderungan secara umum bahwa sistem ekonomi di suatu negara “bergandengan tangan” dengan sistem politik di negara yang bersangkutan, di mana ideologi ekonomi berjalan seiring dengan ideologi politik.

Pada negara-negara yang berideologi politik liberalisme dengan rejim pemerintahan yang demokratis, pada umumnya menganut ideologi ekonomi kapitalisme dengan pengelolaan ekonomi yang berlandaskan pada mekanisme pasar. Di negara-negara ini penyelenggaraan kenegaraannya bersifat egaliter dan struktur birokrasinya desentralistis. Sedangkan negara-negara yang berideologi politik komunisme dengan rezim pemerintahan yang otoriter, ideologi ekonominya cenderung sosialisme, dengan pengelolaan perekonomian berdasarkan perencanaan terpusat. Di negara-negara ini penyelenggaraan kenegaraannya

cenderung bersifat etatis dengan struktur birokrasi yang sentralistis.

Pengkutuban sistem ekonomi dan sistem politik yang terlihat pada tabel di atas mungkin tidak sepenuhnya berlaku, namun terdapat kecenderungan umum seperti itu. Pada umumnya negara-negara yang sistem politiknya tergolong di “Kutub A” sistem ekonominya juga tergolong di kutub yang sama. Pada ekstrim lain, negara tergolong di kutub yang sama. Pada ekstrem lain, negara-negara yang sistem politiknya terdaftar di “Kutub Z” , sistem ekonominya juga terdapat di kutub serupa (Subandi, 2018).

Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas, sehingga dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di negara-negara lain berdasarkan beberapa sudut tinjauan seperti:

1. Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi;
2. Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya.
3. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.

Menurut Gray dalam Sumodiningrat (1999), yang membedakan antara sistem ekonomi suatu negara dengan sistem ekonomi negara lain adalah faktor meta ekonomis, seperti pandangan hidup suatu

bangsa, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi, kebudayaan suatu bangsa atau masyarakat.

PENDAPATAN NASIONAL

Pelajaran ekonomi merupakan ilmu sosial yang identik dengan teori dan pemikiran yang memerlukan keahlian tentang pemahaman materi yang baik karena pemahaman teori dan pemikiran sangat diperlukan agar dapat mempelajari materi-materi ekonomi selanjutnya. Dalam pelajaran ekonomi terdapat materi tentang pendapatan nasional.

Pendapatan nasional adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Data pendapatan nasional yang sudah diperoleh dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara tersebut pada masa yang akan datang. Perkiraan ini dapat digunakan untuk seseorang yang ingin melakukan bisnis untuk merencanakan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang, dan untuk merumuskan perencanaan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan di masa yang akan datang.

Pendapatan nasional mengandung beberapa pengertian. Pendapatan nasional bisa berarti Produk Domestik Bruto atau PDB (Gross Domestic Product atau GDP), bisa juga berarti Produk Nasional Bruto atau PNB (Gross National Product atau GNP), dan bisa berarti National Income (NI), yang juga merupakan beberapa pengertian dari pendapatan nasional. Dari ketiga konsep di atas, masih ada konsep lain yang digunakan untuk menilai suatu prestasi perekonomian suatu negara setiap

tahun. Suatu perekonomian dapat dikatakan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam waktu panjang cenderung naik.

Tujuan mendalami pendapatan nasional yaitu untuk menilai tingkat kemajuan dan pertumbuhan suatu negara, untuk memperoleh pemikiran yang maksimal nilai barang dan jasa yang dihasilkan rakyat dalam kurun waktu satu tahun, dan untuk membuat konsep program pembangunan yang berjangka panjang. Manfaat mendalami pendapatan nasional adalah untuk mengetahui tentang susunan dalam perekonomian suatu negara, dapat membandingkan kondisi perekonomian antar daerah atau antar provinsi, dan juga dapat membandingkan kondisi perekonomian negara satu dengan negara lainnya.

A. Sejarah Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional memiliki arti khusus dilambangkan dengan huruf Y. Perhitungan pendapatan nasional dilakukan pertama kali oleh Sir William Petty di Inggris pada tahun 1665. Ketika itu Petty menamakannya dengan “Pendapatan Masyarakat” yang merupakan penjumlahan dari nilai upah yang diterima oleh masyarakat dan nilai pendapatan yang diterima oleh negara dalam waktu setahun. Yang disebut terakhir ini bersumber dari perolehan sewa, bunga, dan keuntungan perusahaan negara. pendapatan masyarakat sekaligus juga merupakan pengeluaran masyarakat, yaitu pengeluaran konsumsi masyarakat dan surplus pendapatan yang tidak dikonsumsi. Dengan kata lain, pendapatan masyarakat yang ditaksir oleh Sir William

Petty saat itu sudah menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Penaksiran yang lebih sistematis dikerjakan oleh Gregory King pada tahun 1696. Pada waktu itu, King menambahkan nilai investasi sebagai salah satu unsur pendapatan nasional.

Negara kedua yang menghitung pendapatan nasional adalah Perancis. Perhitungan pendapatan nasional dilakukan pertama kali oleh Pierre le Pesant de Boisguillebert pada tahun 1690an. Pada awal tahun 1700an Marshall Vauban menyempurnakan perhitungan dengan perluasan cakupan. Menjelang akhir abad ke-18 Francois Quesnay dan sejumlah fisiokrat melakukan perhitungan pendapatan nasional negara Perancis dengan pendekatan produksi. Rintisannya dilanjutkan oleh Lavoisier dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel ekonomi.

Russia dan Amerika Serikat merupakan negara ketiga dan keempat. Perhitungan pendapatan nasional negara Russia dilakukan oleh BFG Hermann dan AN Radishchevsekitar akhir abad ke-18. Perhitungan pendapatan nasional di Amerika Serikat sudah dilakukan sejak tahun 1843 oleh George Tucker dari University of Virginia. Namun perhitungan yang lebih seksama baru dilakukan pada awal tahun 1930an oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Simon Kuznets.

Sampai dengan sebelum Perang Dunia I berakhir tercatat ada 13 negara yang menghitung pendapatan nasionalnya. Di sepanjang kurun antara dua Perang Dunia negara yang menghitung atau

menaksir pendapatan nasional bertambah secara drastis, dari 13 negara pada tahun 1919 menjadi 33 negara pada tahun 1939. Jumlah ini meningkat pesat menjadi 93 negara selama dasawarsa pertama sesudah perang. Minat besar negara-negara untuk menghitung pendapatan nasional dipicu antara lain oleh tiga hal. Pertama, terbitnya “The General Theory” yang dikenalkan oleh Keynes. Isinya mengenai teori tentang penentuan pendapatan nasional. Kedua, terbitnya “Measurement of National Income and the Construction of Social Accounts” oleh Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations) pada tahun 1947 (Kendrick, 2008). Liga Bangsa-Bangsa kemudian berubah menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, United Nations). Ketiga, terbentuknya International Association for Research in Income and Wealth pada tahun 1947.

Di samping semua itu, pada tahun 1953 PBB menerbitkan “A System of National Accounts and Supporting Tables”(biasa disingkat SNA), dan dibagikan kepada negara-negara anggotanya. Sejak tahun 1968 SNA melakukan perbaikan menjadi acuan perhitungan pendapatan yang memungkinkan perbandingan antarnegara. Konsep dari SNA senantiasa diperbaiki menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, transaksi keuangan dan teknologi. SNA terbaru yang sekarang digunakan adalah SNA 2008.

Negara pertama yang menghitung pendapatan nasional dengan konsep Produk Nasional Bruto adalah Amerika Serikat pada tahun 1942. Negara ini

baru menyajikan pendapatan nasional dengan konsep Produk Domestik Bruto pada tahun 1991. Selain mengacu pada SNA, Amerika Serikat juga memiliki acuan sendiri berjudul “National Income and Product Accounts of the U.S.”, biasa disingkat NIPA. Negara-negara Eropa juga mempunyai pedoman sendiri dengan nama “European System of Accounts”, disingkat ESA. Seperti halnya SNA dan NIPA, ESA juga selalu melakukan perbaikan. ESA terbaru yang kini diacu oleh negara-negara Eropa adalah ESA 2010. Pada masa sekarang ini semua negara di bumi menghitung pendapatan nasionalnya, terutama dengan konsep Produk Domestik Bruto atau PDB, sehingga kinerja ekonomi antarnegara bisa dibandingkan. Perhitungan pendapatan nasional di Indonesia mengacu pada SNA 2008.

B. PEMBAHASAN

a. Pengertian Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu Negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya satu tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Namun pendapat tersebut tidak disepakati oleh ahli ekonomi modern karena menurut ahli ekonomi modern, alat utama untuk mengukur kegiatan perekonomian adalah suatu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh suatu negara. Oleh karena itu pengertian pendapatan nasional adalah ukuran

dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional.

Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang.

b. Arti Penting Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional adalah alat yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat kehidupan atau kemakmuran dalam suatu bangsa atau negara. Secara kuantitatif, tingkat kehidupan dan kemajuan suatu negara itu ditentukan oleh perbandingan antara jumlah Pendapatan Nasional dengan jumlah penduduk dalam suatu negara. Konsep ini biasanya dikenal dengan sebutan pendapatan perkapita. Meskipun pendapatan perkapitanya belum menggambarkan tingkat kemajuan seluruh rakyat.

Pendapatan Nasional dapat digunakan untuk mengetahui susunan perekonomian suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi disetiap sektor perekonomian terhadap penyusunan pendapatan nasional.

Pendapatan Nasional dapat digunakan untuk memutuskan dan menyusun untuk dibuat kebijakan yang sekiranya dipandang perlu. Contoh pada sektor pertanian, dapat disusun berbagai macam kebijakan seperti penyediaan pangan, industri pupuk, irigasi dan sebagainya.

Pendapatan Nasional dapat digunakan untuk melihat dan membandingkan kegiatan perekonomian masyarakat dalam periode tertentu. Hal ini berkaitan dengan pergerakan arus kehidupan ekonomi.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional

1. Permintaan dan penawaran agregat

Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga.

2. Konsumsi dan Tabungan

Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun, sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi.

3. Investasi

Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada.

c. Jenis-jenis pendapatan nasional

1. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product)

Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi didalam batas wilayah suatu Negara (domestik) selama satu periode. Dalam menghitung GDP jumlah pasar, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada perhitungan ganda atau double accounting. Konsep GDP meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara pada suatu negara, baik di luar negeri maupun dalam negeri.

2. Produk Nasional Bruto (Gross National Product)

Produk nasional bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara (nasional) selama 1 periode. Dalam menghitung besarnya GNP berdasarkan harga pasar, yang harus diperhatikan yaitu jangan sampai ada perhitungan ganda. Dalam GNP ini, hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada didalam negeri

maupun diluar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

Contoh:

GDP (Miliar rupiah) negara A sebesar 6.500.900, pendapatan penduduk negara A yang ada di negara B sebesar 200.500, dan pendapatan penduduk asing di negara A sebesar 325.800

Maka jumlah GNP adalah:

$$\begin{aligned} \text{GNP} &= \text{GDP} + \text{Pendapatan netto dari luar negeri} \\ &= 6.500.900 + (200.500 - 325.800) \\ &= 6.500.900 - 125.300 \\ &= 6.375.600 \end{aligned}$$

3. Produk Nasional Netto (Net National Product)

Produk Nasional Netto (NNP) adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian. Penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dalam proses produksi umumnya bersifat tafsiran, sehingga dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Penyusutan adalah berkurang barang yang sudah lama karena pemakaian.

Contoh:

Penyusutan alat di perusahaan A sebesar 11.400, maka jumlah NNP adalah:

$$\text{NNP} = \text{GNP} - \text{penyusutan}$$

$$= 6.375.600 - 11.400$$

$$= 6.364.200$$

4. Pendapatan Nasional Netto (Net National Income)

Pendapatan Nasional Netto (NNI) adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI bisa didapat dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan subsidi. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang beratnya dapat digeserkan kepada pihak lain, contoh pajak penjualan, pajak impor, bea ekspor, dan cukai-cukai. Sedangkan subsidi adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat.

Contoh:

Pajak penjualan barang sebesar 125.000, dan subsidi sebesar 30.000, maka jumlah NNI adalah:

$$\text{NNI} = \text{NNP} - \text{Pajak tidak langsung} + \text{Subsidi}$$

$$= 6.364.200 - 125.000 + 30.000$$

$$= 6.269.200$$

5. Pendapatan Perseorangan (Personal Income)

Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya.

Pendapatan perseorangan dapat diperhitungkan dari NNI dikurangi dengan :

1. Pajak Perseroan, yaitu pajak yang dibayar oleh setiap badan usaha kepada pemerintah.
2. Laba yang tidak dibagi, yaitu jumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk tujuan tertentu, contoh untuk keperluan memperluas wilayah perusahaan.
3. Iuran pensiun yaitu iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan perusahaan dengan tujuan untuk dikembalikan setelah tenaga kerja tersebut mencapai umur tertentu dan tidak lagi bekerja.
4. Asuransi yaitu perjanjian antara dua pihak, dimana pihak satu harus wajib membayar iuran atau yang lainnya, dan pihak yang lain harus memberikan jaminan penuh kepada pembayar iuran tersebut.

Dalam pendapatan perseorangan termasuk juga pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah pembayaran-pembayaran di negara-negara yang dibayarkan kepada orang-orang tertentu, dan pembayaran tersebut bukan merupakan

balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi tahun sekarang, melainkan sebagai balas jasa untuk tahun-tahun sebelumnya, atau juga bisa penerimaan yang bukan balas jasa proses produksi pada tahun tertentu, tetapi diambil dari sebagian pendapatan Nasional tahun yang lalu, contoh pembayaran dana untuk orang yang pensiun, tunjangan sosial untuk para pengangguran, tunjangan untuk bekas para pejuang, dan tambahan utang pemerintah dan sebagainya.

Contoh:

Transfer payment sebesar 30.000, pajak perseroan 25.000, laba ditahan 41.500, iuran pensiun 23.800, asuransi sebesar 50.000. aka jumlah PI adalah:

$$PI = NNI + \text{Transfer Payment} - (\text{iuran sosial} + \text{asuransi} + \text{laba ditahan} + \text{pajak perseroan})$$
$$= 6.269.200 + 30.000 - (23.800 + 50.000 + 41.500 + 25.000)$$
$$= 6.269.200 + 30.000 - 140.300$$
$$= 6.439.500$$

6. Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Disposable income diperoleh dari personal

income setelah dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang beratnya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain atau langsung ditanggung jawab oleh wajib pajak. Contoh pajak dari pendapatan.

Contoh:

Pajak pendapatan sebesar 132.900, maka jumlah DI adalah:

$$\begin{aligned}DI &= PI - \text{pajak langsung} \\ &= 6.439.500 - 132.900 \\ &= 6.306.600\end{aligned}$$

d. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

1. Metode Produksi

Dalam metode produksi, pendapatan nasional adalah jumlah nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian di suatu negara. Perekonomian dikelompokkan menjadi sektor ekonomi dan lapangan kerja. Jumlah sektor ekonomi dan lapangan kerja digunakan untuk keperluan perhitungan pendapatan nasional antar negara, dan antar waktu di suatu negara. Pendapatan nasional dihitung dengan cara:

$$Y = (\text{Unit 1} \times \text{Harga 1}) + \text{Nilai tambah} (\text{Unit 2} \times \text{Harga 2}) + \dots + \text{Nilai tambah} (\text{Unit n} \times \text{Harga n})$$

Contoh:

Industri pengolahan bahan tekstil melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Membeli 1500 kapas dari petani kapas dengan harga 150.000 per meter
2. Kapas diolah menjadi benang dengan harga 170.000
3. Benang diolah menjadi kain dengan harga 200.000
4. Kain diolah menjadipakaian garment dengan harga 250.000
5. Pakaian dijual di pusat perbelanjaan dengan harga 300.000 Pendapatan nasional metode produksi (nilai tambah) adalah:

(a) Petani kapas : $1500 \times \text{Rp}150.000 = \text{Rp}225.000.000$

(b) Benang : $(1500 \times \text{Rp}170.000) - (1500 \times \text{Rp}150.000) = \text{Rp} 30.000.000$

(c) Kain : $(1500 \times \text{Rp}200.000) - (1500 \times \text{Rp}170.000) = \text{Rp} 45.000.000$

(d) Pakaian : $(1500 \times \text{Rp}250.000) - (1500 \times \text{Rp}200.000) = \text{Rp} 75.000.000$

(e) Pasar: $(1500 \times \text{Rp}300.000) - (1500 \times \text{Rp}250.000) = \text{Rp} 75.000.000 +$
Pendapatan nasional =
 $\text{Rp}450.000.000$

2. Metode Pendapatan

Dalam metode pendapatan, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu negara dalam jangka waktu biasanya satu tahun. Masyarakat sebagai

pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi akan menerima pendapatan dari perusahaan. Faktor produksi tersebut berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan tenaga ahli. Bagi yang memiliki SDA berupa tanah, maka ia akan memperoleh uang sewa (rent). Bagi yang memiliki SDM, maka ia akan memperoleh upah (wage). Bagi yang mempunyai modal, maka ia akan menerima bunga (interest). Dan bagi yang mempunyai tenaga ahli, maka ia akan memperoleh laba (Profit).

$$Y = \text{rent} + \text{wage} + \text{interest} + \text{profit}$$

Contoh:

Suatu negara memiliki data pendapatan yang diterima masyarakat konsumen terdiri dari pendapatan sewa 123.300, upah 212.500, bunga 232.000, dan laba 315.400. maka jumlah pendapatan nasional adalah:

$$\begin{aligned} &= 123.300 + 212.500 + 232.000 + 315.400 \\ &= 883.200 \end{aligned}$$

3. Metode Pengeluaran

Dalam metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang telah dipakai oleh seluruh sektor perekonomian. Perekonomian dikelompokkan dalam empat sektor yang sama dalam metode pendapatan.

Hasil perhitungan pendapatan nasional berdasarkan ketiga metoda tersebut berdasarkan teori akan menghasilkan angka yang sama, untuk negara yang sama pada tahun yang sama. Jika terdapat perbedaan, biasanya nilainya relatif kecil atau tidak material. Di antara ketiga metoda perhitungan, yang paling lazim digunakan dan disajikan oleh negara-negara di dunia adalah perhitungan dengan metoda atau pendekatan pengeluaran. Berdasarkan pendekatan pengeluaran (expenditure approach), pendapatan nasional (Y) adalah jumlah nilai pengeluaran yang dibelanjakan oleh sektor-sektor rumahtangga, bisnis, dan pemerintah; sertasektor perdagangan luar negeri jika perekonomian bersifat terbuka, yakni terdapat kegiatan ekspor (X) dan impor (M).

Pelaksana ekonomi di sektor rumah tangga adalah orang perorangan atau rumahtangga. Pelaksana di sektor bisnis adalah industri atau perusahaan. Adapun pelaksana di sektor pemerintah yaitu pemerintah pusat negara yang bersangkutan.

Pengeluaran agregat sektor rumah tangga tercermin dari pengeluaran konsumsi masyarakat atau penduduk, yakni bagian dari pendapatan yang tidak ditabung. Pengeluaran agregat sektor rumah tangga dilambangkan dengan huruf C, inisial dari Consumption expenditure. Pengeluaran agregat sektor bisnis

diwakili oleh nilai investasi yang dibelanjakan oleh perusahaan-perusahaan (Investment expenditure), dilambangkan dengan I. Pengeluaran agregat sektor pemerintah maksudnya ialah belanja rutin pemerintah (Government expenditure), dilambangkan dengan G. Dengan demikian, pendapatan nasional (Y) berdasarkan pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan sebagai: $Y = C + I + G$.

Dalam ringkasan ini tercantum bahwa perekonomian negara bersifat tertutup, tidak ada hubungan ekonomi dengan pihak luar negeri atau negara lain. Apabila perekonomian bersifat terbuka, terdapat ekspor (X) dan impor (M), maka rumus perhitungan Y menjadi $Y = C + I + G + (X - M)$. Rumusan diatas merupakan model dasar dari makroekonomi. Model dasar tersebut sangat populer di kalangan para ekonom dan mahasiswa ekonomi. Akademisi, peneliti, dan pengambil keputusan jajaran pemerintahan menggunakannya sebagai alat untuk menganalisis dan sebagai landasan kebijakan makroekonomi.

Contoh:

Pengeluaran rumah tangga yang terjadi di suatu negara terdiri dari konsumsi rumah tangga 342.300, investasi produsen 250.000, pengeluaran pemerintah 239.000, ekspor barang dan jasa 348.300, impor barang dan jasa 158.000. maka pendapatan nasional adalah

$$\begin{aligned}
&= 342.300 + 250.000 + 239.000 + (348.300 - 158.000) \\
&= 342.300 + 250.000 + 239.000 + 190.300 \\
&= 1.021.600
\end{aligned}$$

Dilihat dari metode perhitungan seperti metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran, pendapatan nasional, dapat diartikan bahwa pendapatan nasional adalah jumlah dari semua pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaksana ekonomi dalam sebuah negara dalam waktu satu tahun.

Besar kecilnya pendapatan negara ditentukan oleh jumlah produk yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi. Dilihat dari jumlah produk yang dihasilkan, Pendapatan nasional diekompokkan menjadi: Produk Nasional Netto/Net National Product (NNP), Pendapatan Nasional Bersih/Net National Income (NNI), Pendapatan Perseorangan/Personal Income (PI), dan Pendapatan yang Siap Dibelanjakan/ Disposable Income (DI) Pendapatan rata-rata tiap penduduk.

Tingkat GDP tinggi yang dimiliki suatu negara tidak menunjukkan ukuran bahwa negara tersebut makmur, karena bisa jadi jumlah penduduk yang tercantum dalam GDP sangat tinggi. Dengan demikian, ukuran yang tepat untuk mengukur kemakmuran dalam suatu

negara adalah dengan menghitung pendapatan perkapitanya.

Pendapatan perkapita yaitu jumlah besarnya pendapatan penduduk yang ada dalam suatu negara yang diperoleh dari hasil pendapatan nasional jumlah penduduk dinegara tersebut, atau disebut dengan GDP perkapita. Apabila pendapatan perkapita meningkat dan laju inflasi kecil, maka kemakmuran suatu negara meningkat.

Karena pendapatan perkapita sangat berpengaruh dalam jumlah penduduk, maka untuk menghitung pendapatan perkapita yaitu:

$$\text{GDP per kapita} = \frac{\text{GDP Tahun X}}{\text{Jumlah Penduduk Tahun X}}$$
$$\text{GNP per kapita} = \frac{\text{GNP Tahun X}}{\text{Jumlah Penduduk Tahun X}}$$

Hubungan Antara Konsep-konsep Pendapatan Nasional

Konsep pendapatan pada dasarnya terjadi hubungan satu dengan yang lain. Peranan sektor yang ikut serta dalam pembentukan GNP adalah, yaitu Rumah Tangga Bisnis (RTB), Rumah Tangga Pemerintah (RTP), dan Rumah Tangga Konsumen (RTK). Pengurangan dikeluarkan dari GNP. Pengurangan atau penyusutan ini adalah uang yang akan dimasukkan ke Rumah Tangga Bisnis, karena

bisnis itulah yang akan digunakan untuk merubah alat-alat modal yg sudah rusak.

Dari NNI kemudian dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini mengalir ke Rumah Tangga Pemerintah. Pajak pemerintah digunakan untuk membayar kegiatan pemerintah demi kesejahteraan rakyat. Nasional income dikurangi laba tak terbagikan da laba perusahaan perseroan. Laba tak terbagikan mengalir kembali masuk ke Rumah Tangga Bisnis dan pajak laba perusahaan perseroan mengalir ke Rumah Tangga Pemerintah. Disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan dikurangi dengan pajak perseorangan yang seterusnya mengalir ke Rumah Tangga Pemerintah.

Disposable Income atau pendapatan yang siap dibelanjakan ini digunakan untuk konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan sisanya dimasukkan dalam tabungan. Tabungan ini mengalir ke Rumah Tangga Bisnis untuk digunakan.

GNP pada umumnya sama dengan GNI sebagai GNP, maka produk yang ada didalamnya kemungkinan besar dibeli orang dan pendapaan yang ada didalam GNI akan dibelanjakan. Produk yang ada didalam GNP ada berbagai macam dan semua itu akan dibeli orang. Orang yang memberi semua produksi GNP terdiri dari empat jenis barang, yaitu:

1. Konsumen yang membeli barang kontribusi
2. Investor yang membeli barang investasi
3. Pemerintah
4. Pihak luar negeri yang ingin membeli barang ekspor

Pendapatan yang ada didalam GNI dibelanjakan untuk berbagai macam kebutuhan dan didapat pembelian seperti yang ada di GNP, yaitu:

1. Investasi
2. Konsumsi
3. Pengeluaran pemerintah
4. Perdagangan luar negeri

GNP biasanya dipakai untuk mengukur kemajuan ekonomi dalam suatu negara. Oleh karena itu, setiap negara akan berusaha untuk mencapai kenaikan jumlah GNP. Pada dasarnya, GNP bisa berubah setiap tahunnya, baik karena berubahnya jumlah pengeluaran yang dihasilkan, maupun karena perubahan dalam tingkatan harga yang terjadi di pasar.

GNP dan GDP tidak ada perbedaan dalam perhitungannya, yang berbeda hanyalah apa yang dihitung, apakah hasil produksi orang asing didalam negeri. demikian juga dengan milik nasional di luar negeri apakah akan dihitung atau tidak.

Dalam arti jika yang dihitung adalah pendapatan orang dalam negeri yang diluar negeri, tetapi tidak termasuk pendapatan orang

asing yang didalam negeri, maka ini ada kaitannya dengan GN. Sedangkan apabila yang dihitung termasuk pendapatan orang asing yang didalam negeri, tetapi tidak termasuk pendapatan orang dalam negeri yang diluar negeri, maka hal ini berkaitan dengan GNP. Apabila dalam satu tahun atau satu periode tertentu nilai GDP lebih besar dari nilai GNP, maka kebenarannya itu membuktikan bahwa didalam negara tersebut cukup banyak modal asing yang berfungsi didalam negeri.

KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan dalam bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal memiliki tujuan yang persis dengan kebijakan moneter. Perbedaan tersebut terletak pada instrument kebijakan yang diterapkannya, yaitu dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar, sedangkan dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya.

Kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa lepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah memegang kendali atas segala sesuatu yang menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada keberlangsungan negara itu sendiri. Kebijakan ekonomi sangat beragam dan bermacam-macam pula kebijakannya. Oleh sebab itu, pemerintah wajib menganut salah satu kebijakan ekonomi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Apapun sistem ekonomi yang dianut pemerintah, maka itulah sistem ekonomi yang terbaik bagi perekonomian rakyat, meskipun nantinya dalam perjalanannya memiliki berbagai kelemahan.

Kebijakan ekonomi pasti memiliki fenomena yang berdampak positif dan negatif, salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah inflasi. Inflasi merupakan

fenomena yang timbul akibat banyaknya jumlah uang yang beredar, kenaikan biaya produksi, besarnya tarikan permintaan dari konsumen, dan adanya inflasi tularan dari luar negeri. Akibatnya akan mempengaruhi perekonomian didalam negeri dan semakin bertambahnya pengangguran. Selain dampak negatif kebijakan ekonomi, juga memiliki dampak positifnya, yaitu memudahkan pemerintah untuk mengatur perekonomian dan anggaran pembelajaran negara. Sehingga, dengan kebijakan ini maka hasil yang didapatkan digunakan untuk keperluan didalam negeri dan keperluan rakyat.

A. PEMBAHASAN

1. Asal Mula Kebijakan Fiskal

Kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah belum lama muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Maka timbulah gagasan dengan sengaja untuk mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kesetabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang dikenal dengan kebijakan fiskal atau politik fiskal. Sebelum tahun 1920-an, pengeluaran pemerintah hanya dianggap sebagai alat untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah dan dinilai atas dasar asas manfaat langsung yang dapat ditimbulkannya tanpa melihat pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Sebaliknya pajak hanya sebagai sumber pembiayaan pengeluaran

negara dan belum diketahui pengaruhnya terhadap pendapatan nasional.

Akibatnya dalam masa depresi di mana penerimaan pemerintah menurun, maka pengeluaran pemerintah harus dikurangi pula. Hal ini berpengaruh terhadap pendapatan nasional serta semakin lesunya perekonomian. Kalau timbul deflasi atau inflasi kebijakan yang diambinya adalah kebijakan moneter lewat bank sentral dan bukan kebijakan fiskal. Pada masa depresi pada tahun 1930-an teori kebijakan fiskal pertama kali mulai muncul karena tidak mempunyai kebijakan moneter dalam menanggulangi depresi itu. Kebijakan moneter berguna untuk merangsang kegiatan individu atau swasta. Pada saat terjadi pengangguran harga-harga turun deoresi, maka oleh kebijakan moneter dengan cara menambah jumlah uang yang beredar lewat politik dengan menurunkan tingkat bunga atau dengan politik pasar terbuka, dimana pemerintah membeli surat berharga. Pada masa depresi yang paling amat parah adalah masalah pengangguran dan kebijakan fiskal berorientasi masalah pengguran dan masalah ingflasi.

Dasar pemikiran dalam kebijakan fiskal ialah bahwa pemerintah tidak dapat disamakan dengan individu dalam pengaruh dari tindakan masing-masing terhadap masyarakat sebagai keseluruhan. Umumnya para individu akan mengurangi pengeluaran apabila penerimaanya menurun, sedangkan pemerintah tidak harus berbuat

demikian, karena apabila pemerintah mengurangi pengeluarannya, maka tindakan ini akan lebih menyusahkan atau memperberat jalannya perekonomian karena menurunnya pengeluaran pemerintah akan berarti menurunnya pendapatan masyarakat sebagai objek pajak dan justru memperkecil penerimaan pemerintah lagi. Di samping itu juga disadari bahwa dalam masa depresi banyak dana masyarakat (swasta) yang menganggur, sehingga peningkatan dalam pengeluaran pemerintah tidak akan mengurangi investasi sektor swasta lewat kenaikan tingkat bunga.

2. Pengertian Kebijakan Fiskal

Fiskal adalah sebuah kata yang dirujuk dari bahasa latin, *fiscus* yang berarti pemegang kuasa dari keuangan pertama di zaman romawi kuno. Sedangkan, *kbbi* mengartikan fiskal sebagai segala hal yang berkaitan dengan urusan pendapatan negara atau pajak. Kebijakan fiskal pertama kali dicetuskan oleh John Maynard Keynes asal Inggris pada tahun 1883. Berdasarkan pendapat John Maynard Keynes tersebut, kebijakan fiskal dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut mampu menyesuaikan pengeluaran negara dengan pendapatan yang diterima dari pajak.

Menurut Keynes, *fiscal policy* yang dilakukan dalam jangka panjang mampu mengatasi masalah ekonomi yang terjadi dalam sebuah negara. Serta, dianggap bisa menyelesaikan masalah internal

makro lainnya, seperti inflasi, lemahnya kurs mata uang, hingga minimnya lapangan kerja yang tersedia. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dicanangkan suatu negara untuk mengelola serta mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih kondusif. Cara yang ditonjolkan dari kebijakan ekonomi ini adalah dengan mengubah maupun memperbaiki pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Inti dari kebijakan fiskal adalah sebagai upaya pengelolaan dana yang diterima dari pajak untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Dengan begitu, tujuan dari strategi ini dapat tercapai sesuai dengan harapan. Seperti tersedianya fasilitas publik dan pelayanan kesehatan yang mumpuni.

3. Instrumen Kebijakan Fiskal

Untuk mencapai tujuannya, kebijakan fiskal dilakukan menggunakan berbagai instrumen.

a. Anggaran Belanja Seimbang

Anggaran belanja seimbang merujuk kepada anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi perekonomian. Hal ini bertujuan agar dalam jangka panjang, anggaran dapat menjadi berimbang. Apabila terjadi ketidakstabilan ekonomi anggaran defisit akan digunakan, sementara anggaran surplus akan digunakan dalam masa inflasi.

b. Stabilitas Anggaran Otomatis

Stabilitas anggaran otomatis, yaitu penekanan pengeluaran pemerintah harus bermanfaat dan memiliki biaya relative dari berbagai program kegiatan

c. Pengelolaan Anggaran

Artinya, hubungan belanja pemerintah dengan penerimaan pajak secara langsung digunakan untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan menyesuaikan anggaran

d. Pembiayaan Fungsional

Pembiayaan ini merujuk kepada pengeluaran pemerintah yang diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja.

4. Macam-Macam Kebijakan Fiskal

Dalam perkembangan kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi empat macam atas dasar:

a. Pembiayaan Fungsional (Functional Finance)

Tokoh dari kebijakan fiskal ini adalah ap.lener. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah dengan melihat akibat-akibat terhadap pendapatan nasional terutama guna meningkatkan kesempatan kerja (employment). Di lain pihak pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta dan bukan untuk

meningkatkan penerimaan pemerintah, sehingga pada saat ada pengangguran pajak sama sekali tidak diperlukan. Selanjutnya pinjaman akan dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengangguran dana yang tersedia dalam masyarakat. Kemudian apabila pajak maupun pinjaman dirasa tidak tepat maka ditempuh pencetakan uang. Jadi pengeluaran pemerintah dan perpajakan dipertimbangkan sebagai suatu hal yang terpisah, namun demikian ada kekhawatiran bahwa tanpa ada hubungan langsung antara keduanya akan ada bahayanya karena kemungkinan pengeluaran pemerintah semakin berlebihan.

b. Pengelolaan Anggaran

Pendekatan ini lebih banyak disukai dari pada pendekatan “pembelanjaan fungsional” karena pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman dimaksudkan untuk pencapaian kesetabilan ekonomi yang lebih mantap. Dalam pendekatan ini, hubungan antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat dapat terjadi defisit maupun surplus. Tokoh dalam pendekatan ini adalah Alvin Hansen yang menyarankan bahwa dalam masa depresi di mana banyak pengangguran, pengeluaran pemerintah adalah satu-satunya obat.

Dalam perkembangan pemikiran lebih lanjut, penggunaan anggaran belanja yang seimbang untuk jangka panjang diperlukan dengan catatan bahwa dalam masa depresi ditempuh anggaran defisit sedangkan dalam masa inflasi ditempuh anggaran belanja surplus. Dalam perkembangan yang lebih jauh lagi, pendekatan ini selalu berusaha untuk mempertahankan adanya anggaran belanja yang seimbang tanpa deficit anggaran belanja. Sehingga dalam masa defresi (perekonomian lesu) pengeluaran pemerintah akan ditingkatkan dan penerimaan dari pajakpun akan ditingkatkan pula tetapi jangan sampai menimbulkan deplasi.

Sebaliknya dalam masa inflasi, pajak akan dimanfaatkan sebaik-baiknya guna mencegah timbulnya akibat inflasi yang tidak diinginkan. Kebaikan dari pendapat ini ialah bahwa pinjaman negara tidak akan meningkat, tetapi sayangnya sektor swasta menjadi kurang bersemangat karena kurang percaya pada diri sendiri.

c. Stabilisasi Anggaran Otomatis

Pada akhir tahun 1940-an kepercayaan lebih banyak diberikan kepada mekanisme otomatis dari politik fiskal. Penyesuaian secara otomatis dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah terjadi sedemikian rupa sehingga membawa pada perekonomian menjadi stabil tanpa campur tangan pemerintah yang

disengaja. Dengan stabilitas otomatis, pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasar atas perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh.

Apabila ada kemunduran dalam kegiatan usaha, program pengeluaran pemerintah dan perpajakan tidak akan diubah, namun penerimaan dari pajak akan menurun, terutama dari pajak pendapata.

Di lain pihak jumlah pengeluaran pemerintah akan meningkat terutama yang dikaitkan dengan gaji, pensiun, bantuan sosial dan sebagainya. Akibat defisit dalam anggaran belanja pemerintah muncul dan mendorong perkembangan sektor swasta kembali sampai tercapinya kesempatan kerja penuh. Sebaliknya dalam masa inflasi ada kenaikan dalam penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak pendapan tidak perlu banyak tunjangan pengangguran, sehingga akan ada surplus anggaran belanja. Peranan "built in flexibility" ini dapat ditingkatkan dengan penambahan pengeluaran pemerintah pada proyek-proyek pekerjaan umum.

d. Anggaran Belanja Seimbang

Suatu modifikasi dari atas anggaran yang disesuaikan dengan keadaan (managed bidget) adalah pebelajaran secara seimbang dalam

jangka panjang, tetapi ditempuh pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Kegagalan dalam mempertimbangkan keseimbangan anggaran dalam jangka panjang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dapat pula diikuti pendekatan serupa tetapi tetap mempertahankan keseimbangan anggaran. Dalam masa depresi, pengeluaran perlu ditingkatkan diikuti pula dengan peningkatan penerimaan sehingga tidak akan memperbesar utang negara.

5. Tujuan Kebijakan Fiskal

Secara garis besar, tujuan dari kebijakan fiskal ialah untuk mempengaruhi jalannya :

a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Serta Pdb Suatu Negara

Kebijakan fiskal memiliki tujuan guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara maksimal sebab sangat berperan dalam pemasukan atau pendapatan negara. Hal itu meliputi: bea dan cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, contoh pengeluaran negara yang dimaksud yaitu:

- a) Pembangunan sarana dan prasarana umum.
- b) Pesawat dan program lain untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Belanja persenjataan.

d) Proyek pemerintah.

b. Mengurangi Angka Pengangguran Dan Memperluas Lapangan Kerja.

Karna bukan rahasia, kalau pengangguran merupakan salah satu pokok masalah dalam suatu negara. Di Indonesia sendiri, tingkat pengangguran telah berkurang sebanyak 140.000 jiwa. Dalam persentase tingkat pengangguran terbuka, dalam bulan Februari tahun 2017 angkanya mencapai hingga 5,33%, dan dalam bulan Februari.

Turunnya dari harga suatu produk tentunya membuat hilangnya harapan dalam mendapat keuntungan terhadap sektor swasta. Namun, harga suatu produk yang terus meningkat juga dapat mengakibatkan terjadinya inflasi. Di sisi lain, inflasi dapat juga memberikan keuntungan, contohnya dalam menciptakan kesempatan kerja penuh. Namun lagi-lagi, inflasi juga dapat berdampak negatif terhadap suatu kelompok atau orang yang memiliki penghasilan rendah sebab daya beli menjadi turun.

Permasalahan inflasi yang tidak kunjung stabil memiliki potensi besar dalam membuat keyakinan masyarakat kepada pemerintah menjadi berkurang. Melalui kebijakan fiskal, tingkat dari pendapatan nasional, kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, serta

distribusi penghasilan nasional pun diharapkan mampu berjalan dengan baik.

6. Tujuan Utama Kebijakan Fiskal

Umumnya tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan fiskal adalah kesetabilan ekonomi yang lebih mantap artinya tetap mempertahankan lalu pertumbuhan ekonomi yang lebih mantap artinya tetap mempertahankan laju ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau adanya ketidakstabilan harga- harga umum. Kesetabilan ekonomi tidak berarti kesetabilan harga untuk semua sektor perekonomian, karena perubahan harga relatif sangat diperlukan bagi penyesuaian dalam perubahan teknologi, preferensi konsumen dan tersedianya faktor produksi, agar penggunaan optimum dalam penggunaan sumber daya ekonomi dapat terealisasi.

a. Mencegah Pengangguran

Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berarti tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimum, tetapi juga berakibat kurangnya menyenangkan bagi perorangan yang menderita atau yang mengalami pengurangan. Kesempatan kerja penuh (full employment) dapat kita artikan sebagai keadaan di mana semua pemilik faktor

produksi yang ingin memperkerjakannya pada tingkat harga atau upah yang berlsku dapat memperoleh pekerjaan bagi faktor-faktor produksi tersebut.

Konsep kesempatan kerja ini di hubungkan dengan kesempatan kerja manusia, karena pengangguran tenaga kerja manusia inilah yang mempunyai pengaruh soial yang sangat luas. Dengan definisi di atas maka pencapain tenaga kerja penuh itu sangat sukar tercapai, karena pada setiap saat tentu ada faktor-faktor produksi yang kehilangan lapangan kerja dan pada saat ini pula belum mendapat pekerjaan berhubungan dengan adanya ketidak sempurnaan pasar.

b. Stabilitas Harga

Aspek kedua dari kebijakan fiskal adalah mempertahankan kesetabilan harga umum pada tingkat yang layak. Pneurunan yang tajam dalam harga-harga umum jelas akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor swasta akan kehilangan harapan keuntungan, bahkan keuntungan mereka akan semakin mengecil. Selanjtnya investasi sektor swasta dapat tidak ada lagi lebih-lebih bila mereka mengharapkan harga-harga akan turun terus sebaliknya harga-harga umum yang meningkat terus juga mempunyai akibat yang tidak menggembarakan.

Inflasi memang dapat menciptakan kesempatan kerja penuh dan memberikan keuntungan kepada beberapa kelompok orang, tetapi juga mempersulit kehidupan orang-orang yang berpenghasilan rendah dan terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Inflasi yang deras akan cenderung melemahkan juga sektor usaha swasta karena investasi produktif umumnya berubah menjadi investasi barang-barang tahan lama seperti rumah, tanah dan sebagainya. Dalam jangka panjang inflasi akan berakibat pada kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintahnya.

c. Menekan Pengeluaran Negara

Tujuan selanjutnya dari kebijakan fiskal adalah untuk memperkecil pengeluaran anggaran negara. Pada dasarnya kebijakan tersebut akan mengatur pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah ke hal-hal yang lebih diprioritaskan dan meningkatkan beban pajak. Sehingga, anggaran negara tidak akan bergerak ke arah defisit. Jika dilakukan dengan tepat, kebijakan fiskal mampu meningkatkan iklim ekonomi negara. Saat perekonomian negara bergerak maju dan meyakinkan, akan ada banyak investor yang berdatangan. Dengan begitu, laju investasi negara akan lebih pesat dan pendapatan negara akan naik secara drastis karena pajak yang didapat dari investasi para pengusaha.

7. Jenis Kebijakan Fiskal

Digunakan guna memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, contohnya pada saat inflasi tumbuh pesat. Hal ini tentunya merupakan kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, dimana kebijakan fiskal kontraktif akan meningkatkan pajak serta memotong pengeluaran.

8. Jenis Kebijakan Fiskal Berdasarkan Teori:

- a. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional: untuk mengatur pengeluaran oleh pemerintah dengan cara memperhatikan pengaruhnya terhadap peningkatan dalam hal kesempatan kerja.
- b. Kebijakan pengelolaan anggaran: mengatur pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak serta pembiayaan guna mencapai laju perekonomian yang stabil.
- c. Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis: mengatur jumlah pengeluaran pemerintah dengan cara menimbang serta menganalisa biaya dan juga manfaat dari berbagai macam pengeluaran yang digunakan.

9. Kebijakan Fiskal Dari Jumlah Penerimaan & Pengeluaran

a. Anggaran Dinamis

Dalam hal ini, anggaran akan disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total sehingga nantinya stabilitas ekonomi bisa terjaga.

10. Manfaat Dari Diberlakukannya Kebijakan Fiskal

Sudah umum dipahami jika tanggung jawab dari pemerintah adalah untuk menjaga serta menjalankan dengan baik perekonomian negara. Dengan kondisi perekonomian yang baik dan stabil, rakyat mampu mendapatkan taraf hidup yang lebih sejahtera. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi negara sedang kacau, yang menerima dampak negatifnya sudah pasti masyarakatnya juga. Agar perekonomian negara dapat pulih dari keterpurukan, dikeluarkanlah kebijakan fiskal oleh pemerintah. Alasan utamanya karena kebijakan tersebut mampu memberikan beragam manfaat yang dibutuhkan negara dan masyarakat. Berikut ulasannya:

a. Dapat Menumbuhkan Kondisi Ekonomi Yang Lebih Baik

Manfaat utama dari kebijakan fiskal adalah membuat ekonomi negara bertumbuh ke arah yang lebih baik. Hal ini tentu dilakukan untuk kebaikan negara.

b. Pengalokasian Sumber Daya Yang Lebih Efektif Dan Tepat Sasaran

Saat melakukan kebijakan fiskal, pemerintah akan mengelola jumlah uang kas yang masuk untuk kebutuhan internal yang lebih penting dan berpengaruh positif pada masyarakat luas. Kebutuhan internal tersebut bisa meliputi pemberian fasilitas publik, jaminan sosial yang lebih memadai, dan lain sebagainya.

Yang penting adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah hanya pada hal-hal yang krusial dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan begitu, rakyat tetap bisa menjalankan aktivitas rutinnnya seperti biasa dan tetap menjadi produktif.

c. Menstabilkan Kondisi Ekonomi Negara Jangka Pendek

Kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil dan fluktuatif membuat pemerintah harus proaktif mencanangkan kebijakan fiskal yang dianggap perlu untuk diaplikasikan. Salah satu contoh ketidak-stabilan kondisi ekonomi negara adalah saat harga pangan atau suatu komoditas mengalami krisis dan harganya melambung tinggi. Akibatnya, daya beli konsumen akan berkurang dan pemerintah perlu menstabilkan harganya kembali.

Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan berupa penurunan pajak dari penjualan komoditas tersebut sehingga harga jualnya menjadi sedikit lebih terjangkau. Dalam kasus yang berbeda, yang mana kondisi ekonomi negara sedang kacau karena inflasi berskala besar, pemerintah dapat membatasi pembelanjaan negara. Jika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah adalah

menaikkan pajak yang dibebankan kepada masyarakat.

d. Pemerintah Mampu Melakukan Pengembangan Pada Pembangunan Jangka Panjang Negara

Melalui pembangunan berjangka panjang tersebut, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Dengan begitu, masyarakat dapat memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil, fasilitas, serta infrastruktur publik yang lebih memadai.

11. Contoh Kebijakan Fiskal Yang Pernah Diterapkan Pemerintahan Indonesia

Dalam beberapa kurun waktu belakangan, pemerintah indonesia telah beberapa kali menerapkan kebijakan fiskal untuk meredam terpaan kondisi ekonomi dunia. Kebijakan ekonomi tersebut terbukti berhasil membuat ekonomi indonesia bergerak ke arah yang positif dan lebih kondusif.

a. Tax Amnesty

Contoh kebijakan fiskal pertama yang dilakukan pemerintah adalah pada saat presiden jokowi mencanangkan program amnesti pajak di tahun 2017 lalu. Banyaknya laporan penunggakan pajak dan individu yang tidak melaporkan jumlah kekayaan kala itu membuat pemerintah memutuskan untuk meluncurkan program tax amnesty.

Dihilangkannya sanksi administrasi, pidana, dan juga denda keterlambatan pembayaran pajak mampu membuat pemasukkan negara meningkat hingga 130 triliun rupiah. Ini adalah sebuah bukti nyata mengapa kebijakan tersebut perlu dilakukan oleh sebuah negara.

b. Subsidi Bahan Bakar Minyak

Pengurangan jumlah subsidi bbm yang seringkali dilakukan oleh pemerintah belakangan terakhir juga merupakan contoh kebijakan fiskal lainnya. Meski harga jual bahan bakar menjadi lebih mahal dan tidak stabil, pemerintah mampu mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kebutuhan lain yang lebih penting dan mendesak. Dengan begitu, kualitas hidup masyarakat luas akan menjadi lebih berdaya

12. Kebijakan Fiskal Membantu Ekonomi Tetap Stabil

Disadari atau tidak, kebijakan fiskal sebenarnya cukup mudah ditemui sebagai upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Tanpa memiliki sikap proaktif dalam mengeluarkan kebijakan tersebut, bukan tidak mungkin pemerintah akan membuat negara akan bergerak ke kondisi ekonomi yang tidak sehat. Untuk itu, pahami tentang apa itu kebijakan fiskal dan pengaruhnya pada keadaan agar cita-cita indonesia menjadi negara maju dapat terwujud.

13. Kebijakan Fiskal Kaitannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Kebijakan fiskal dapat berupa kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan output perekonomian. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif bertujuan mengurangi output perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan fiskal juga merupakan instrumen stabilisasi pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output perekonomian menurut Solow dipengaruhi oleh tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Tabungan merupakan instrumen yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal (penerimaan pajak dan belanja negara mempengaruhi tabungan nasional). Secara tidak langsung kebijakan fiskal ikut mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi. Keputusan-keputusan pemerintah mengenai kebijakan fiskal yang ditempuh suatu negara dapat mengubah output dalam perekonomian, baik bertambah maupun berkurang.

Penurunan pajak t maupun peningkatan belanja g memiliki multiplier effect (efek penggandaan) terhadap pendapatan (output perekonomian) suatu negara. Alasannya ialah pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Kenaikan belanja

pemerintah menyebabkan meningkatnya pendapatan, kemudian meningkatkan konsumsi, yang selanjutnya meningkatkan pendapatan, kemudian meningkatkan konsumsi dan seterusnya. Besarnya pengganda belanja pemerintah yaitu: jika $mpc = 0,6$, kenaikan belanja pemerintah g sebesar $rp1,00$ akan meningkatkan pendapatan ekuilibrium y sebesar $rp2,50$. Sementara itu, besarnya pengganda perubahan pajak yaitu:

Jika $mpc = 0,6$, penurunan pajak t sebesar $rp1,00$ akan meningkatkan pendapatan ekuilibrium y sebesar $rp1,50$ (tanda negatif mengindikasikan pendapatan yang bergerak ke arah berlawanan dari pajak). Itulah mengapa kebijakan fiskal berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memainkan peranan penting mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. Untuk itu, kebijakan fiskal senantiasa diarahkan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, namun dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Pada tahun 2013 hingga 2017, Indonesia menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dari penerapan kebijakan defisit. Kebijakan ini disebabkan oleh peningkatan belanja pemerintah g yang melebihi pendapatan. Peningkatan tersebut

salah satunya bertujuan menstimulasi perekonomian melalui peningkatan alokasi belanja modal untuk infrastruktur dalam meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi.

Dampak dari peningkatan belanja pemerintah g ialah meningkatnya pendapatan ekuilibrium y pada perekonomian indonesia dalam 5 tahun. Namun, peningkatan yang terjadi tidak secara terus-menerus. Kenyataannya, walaupun belanja pemerintah g terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, namun persentase pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi dan cenderung menurun.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 – 2017 (persen) perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh sejumlah alasan, diantaranya kinerja pertumbuhan pdb masih dibayangi oleh ketidakpastian kondisi ekonomi global, khususnya di negara-negara maju seperti jepang dan kawasan eropa. Selain itu, terdapat fluktuasi perubahan asumsi ekonomi makro yang turut berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Jadi, peningkatan belanja pemerintah g akan menambah output perekonomian suatu negara secara langsung. Namun demikian, peningkatan itu tidak serta-merta akan terus terjadi seiring bertambahnya belanja pemerintah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh faktor-faktor lain yang memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, misalnya perekonomian

global yang tidak stabil dan fluktuasi asumsi ekonomi makro.

14. Fungsi Kebijakan Fiskal

Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam undang-undang no. 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 4 tentang keuangan negara, yaitu fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, Stabilisasi, dan distribusi.

- a. Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi, yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara.
- e. Fungsi stabilisasi, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

- f. Fungsi distribusi, yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan.

KEBIJAKAN MONETER

Pemerintah menjadi salah satu tonggak sebuah negara menjadi salah satu peran penting terbentuknya sebuah negara yang aman dan sejahtera. Saat periode 1960-1965 merupakan periode terberat dalam bidang perekonomian yang dialami Indonesia. Indonesia saat itu menganut kebijakan yang dibuat pemerintah dan lebih memomorsatukan kebijakan politik.

Pada saat itu pengeluaran dalam hal ekonomi sangat terkuras untuk kegiatan pemerintah, pemerintah banyak yang membuat proyek-proyek besar yang mengeluarkan kocek yang tak mungkin sedikit. Pemerintah mengurus hampir seluruh perekonomian di negara Indonesia saat itu. Perekonomian di Indonesia menurun dengan tajam tanpa disadari.

Karena semakin turun tajam perekonomian di Indonesia, pemerintah segera bergegas untuk memperbaiki perekonomian. Dan terbitlah kebijakan moneter yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah mengemban tugas mengatur kebijakan moneter tersebut kepada Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia juga tergolong berat. Bank Indonesia di bebaskan untuk menjaga stabilitas keuangan di Indonesia dan menjadi bank yg mengawasi simpan-pinjam di bank bank lain dan kredit langsung terhadap lembaga- lembaga di Indonesia. Bisa disebut Bank Indonesia adalah pemimpin dari bank yang lain dan menjadi bank utama. Kebijakan moneter sampai sekarang masih digunakan dan dapat diandalkan.

A. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah proses mengatur persediaan uang untuk tujuan tertentu. Bertujuan untuk menahan dan mencegah inflasi serta menstabilkan Negara Indonesia dan juga mensejahterahkan pekerja. Kebijakan moneter juga mengeset standar bunga pinjaman dan juga menjadi kapitalisasi untuk bank dan juga bisa dikatakan sebagai peminjam usaha terakhir. Pada hakikatnya Kebijakan moneter dibagi menjadi dua yaitu keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Keseimbangan Internal bisa dilihat dalam pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan juga stabilitas harga uang yang beredar dan pemerataan pembangunan di setiap wilayah di Indonesia. Dalam Keseimbangan eksternal kita lihat dari segi pembayaran utang-utang luar negeri. Dalam dua keseimbangan itu terbentuklah ekonomimakro yang bertujuan menjaga stabilitas keuangan di Indonesia serta luas nya lapangan pekerjaan, harga-harga di pasaran yang stabil serta neraca pembayaran diluar negeri yang seimbang dan berjalan lancar.

Kebijakan ini mengatur variabel makroekonomi serta mikroekonomi, menstabilkan tingkat pengangguran. Kebijakan moneter dilakukan dengan menyesuaikan suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang beredar di pasaran dan juga serta pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah.

Kebijakan Moneter melalui Bank Sentral bertugas mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar bertujuan untuk menstabilkan

perekonomian negara. Di Indonesia kedudukan Bank Sentral diwakili oleh Bank Indonesia. Apabila kestabilan perekonomian Indonesia terganggu diberlakukan Kebijakan moneter agar perekonomian Indonesia berjalan stabil kembali.

B. Jenis-jenis Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter digunakan pemerintah untuk memecahkan masalah dan menstabilkan perekonomian. Kebijakan moneter dibagi menjadi:

1. Kebijakan Moneter Ekspansi

Kebijakan ini bisa disebut juga kebijakan longgar, pemerintah menggunakan kebijakan ini untuk meningkatkan atau menambah jumlah uang yang beredar. Pemerintah menggunakan kebijakan ini biasanya saat terjadi depresi ekonomi dan Deflasi (kenaikan nilai mata uang). Alasan terjadinya depresi ekonomi dan Deflasi ini karena meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya permintaan masyarakat akan suatu barang. Saat terjadinya hal ini pemerintah akan mengambil kebijakan ini untuk menstabilkan ekonomi agar perekonomian tetap terjaga.

Kebijakan moneter ekspansi memiliki tujuan menstabilkan perekonomian agar uang yang beredar ini stabil sesuai arahan, harapan dan juga berkesinambungan antara pelaku ekonomi. Yang dimaksud adalah arus uang yang beredar seimbang dengan barang dan jasa yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini bisa memperbaiki neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Jika

dari pihak menurunkan suku bunga yang rendah maka pengusaha terutama pengusaha pengeksport barang dapat meningkatkan jumlah ekspor dan mengembangkan usahanya. Kebijakan moneter ekspansif bisa dijalankan dengan melaksanakan instrumen kebijakan politik, antara lain:

a) Kebijakan operasi pasar terbuka

Kebijakan ini dilakukan dengan cara mengendalikan uang yang beredar dengan melakukan jual beli surat berharga pemerintah. Surat berharga itu diantaranya Surat berharga pasar uang dan Sertifikat Bank Indonesia. Jika ingin mengurangi jumlah uang yang beredar pemerintah akan menjual surat berharga itu kepada masyarakat sedangkan saat pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang yg beredar maka yang dilakukan pemerintah adalah membeli surat berharga pemerintah.

b) Kebijakan Diskonto

Meningkatkan jumlah bunga bank sentral pada bank umum untuk mengendalikan jumlah uang. Biasanya bank umum mengalami kekurangan uang tunai, langkah yang harus dilakukan harus meminjam kepada bank sentral. Untuk menambah atau meningkatkan jumlah uang yang beredar, pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga bank sentral karna menurunnya suku bunga ini banyak orang yang berminat dan akan meminjam ke bank. Dan juga bisa meningkatkan bunga agar uang

yang beredar kurang bertujuan mengurangi minat masyarakat untuk meminjam ke bank.

c) Rasio Cadangan Wajib

Rasio cadangan wajib memiliki arti pemerintah akan mengatur dan menetapkan dana cadangan yang dimana dana cadangan itu di simpan kepada pemerintah dan dipenuhi oleh bank umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Saat pemerintah akan menurunkan harga yang dilakukan adalah menaikkan rasio, begitu sebaliknya pemerintah akan menaikkan harga dengan cara menurunkan rasio.

d) Kebijakan Kredit Selektif

Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga atau mengetatkan jumlah uang yang beredar agar tidak terjadinya hal hal yang berlebihan dan merugikan perekonomian di Indonesia. Pemerintah disini akan menjadi penentu diberikan atau tidaknya kredit tersebut. Saat pemerintah akan menambah atau menaikkan jumlah uang yang beredar maka yang dilakukan adalah melonggarkan kredit yang diberikan. Dan begitu juga sebaliknya saat pemerintah akan menurunkan jumlah uang yang beredar maka pemerintah akan menjalankan kredit selektif ini yaitu mengetatkan jumlah uang yang beredar.

e) Kebijakan Himbauan Moral

Tujuan dibuatnya kebijakan ini untuk mengatur dan menjalankan kebijakan moneter dengan menghimbau para pelaku ekonomi dalam hal membayar kredit dan juga simpan pinjam dan apapun yang berhubungan dengan bank. Dan juga kebijakan ini menghimbau kepada bank supaya meminjam uang lebih kepada bank sentral supaya memperbanyak jumlah uang yang beredar di perekonomian Indonesia.

f) Politik Saneering

Dalam undang undang No.3 pasal 7 tahun 2004 tentang Bank Indonesia memiliki tujuan yaitu menjaga dan memelihara keuangan negara agar stabil. Dan yang dimaksud politik saneering ini adalah bank sentral yang bertugas memotong uang. Alasan ini diberlakukan adalah untuk menyehatkan kembali uang yang jatuh.

g) Devaluasi

Kebijakan ini dilakukan bank sentral untuk menurunkan nilai uang rupiah terhadap mata uang asing yang naik.

h) Revaluasi

Dan ini sebaliknya kebijakan ini dilakukan bank sentral untuk menaikkan nilai uang rupiah terhadap mata uang asing.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif

Kebijakan ini diberlakukan atau memiliki arti mengurangi jumlah uang yang beredar. Alasan kenapa diberlakukan kebijakan kontraktif ini bisa karena terjadinya Inflasi. Kebijakan ini bisa disebut kebijakan uang ketat. Bermaksud untuk menjaga keuangan agar tetap stabil. Kebijakan suku bunga naik atau turunnya bisa dilihat dari permintaan masyarakat. Dari sana Bank Indonesia selaku bank sentral akan mencetak uang tapi sesuai permintaan dari masyarakat dari situ bisa tercapainya target dari Bank Indonesia.

Reaksi dari bank Indonesia dilihat dari bagaimana permintaan masyarakat sendiri apabila permintaan uang menurun yang terjadi adalah bank Indonesia akan mengurangi jumlah yang beredar di masyarakat, begitu sebaliknya apabila permintaan uang meningkat maka Bank Indonesia menambah penawaran uang yang beredar.

Kesimpulan yang bisa diambil yaitu semakin banyak pendapatan dari masyarakat maka permintaan uang masyarakat akan meningkat.

C. Tujuan Kebijakan Moneter

Setiap program yang dibuat pemerintah pasti memiliki tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian besar yang ditimbulkan. Berkaca dari tahun 1960- 1965 Indonesia yang memiliki banyak proyek besar tapi tidak ada rem dalam pengambilan uang, tidak ada koordinir, tidak ada yang menjaga. Tapi Indonesia belajar dari pengalaman masa lalu. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi

Indonesia memikirkan cara apa yang bisa membuat keuangan di Indonesia stabil tanpa mendapat kerugian. Di dunia perekonomian siapa yang tidak mengenal akan untung dan rugi. Pasti semua pernah mengalami untung dan rugi bila di dunia perekonomian. Jadi Indonesia bangkit dari kesalahan itu dan mencari letak kesalahan dan membuat suatu kebijakan untuk merubah sistem perekonomian di Indonesia sebelum Indonesia mengalami masa kritis yang sangat dalam. Pemerintah membuat suatu kebijakan yang dinilai akan merubah perekonomian di Indonesia yaitu kebijakan moneter.

Tujuan kebijakan moneter ini antara lain:

1. Membantu pemerintah dalam menjalankan program yang belum atau tidak terealisasikan dengan cara memberi sumber penerimaan normal.
2. Menjaga kestabilan keuangan negara dengan mengawasi barang dan jasa seimbang dengan permintaan masyarakat.
3. Mengedarkan uang yang tersedia sebagai alat tukar di dalam perekonomian negara
4. Untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Semua berawal dari pengusaha yang apabila keuangan dalam kantor atau pabriknya stabil maka yang terjadi adalah pengusaha akan membuka cabang yang pastinya akan membuka lapangan pekerjaan yang baru serta bisa juga berinvestasi.

5. Menaikkan neraca perdagangan, agar negara Indonesia bisa menaikkan impor dan mengurangi ekspor.

Banyak sekali tujuan dibuatnya kebijakan moneter ini yang pasti untuk memperbaiki, menjaga, mestabilkan perekonomian negara. Semua berawal dari diri kita sendiri, kita mulai membeli barang dalam negeri dan mulai berhenti untuk mengekspor barang terlalu banyak dari luar negeri tapi pemerintah juga ikut berperan dalam mencegah agar barang yg di ekspor tidak terlalu banyak. Dan juga kita bisa ikut berpartisipasi dalam mensejahterakan Indonesia dengan ikut membayar pajak, mulai berinvestasi, mulai mencoba hal di bidang barang maupun jasa. Sukses atau tidaknya semua dari diri kita sendiri. Bukan hanya pemerintah yang menjalankan ini semua. Ibarat sebuah bus pemerintah bertindak sebagai supir dan kita menjadi penumpang. Karena itu apabila kita sebagai rakyat ikut berpartisipasi maka keuntungan akan banyak didapat dan juga predikat Indonesia menjadi negara maju.

D. Fungsi kebijakan Moneter

1. Mempertahankan Musim Berinvestasi

Apabila pendapatan yang didapatkan meningkat semakin banyak membuat hal itu menarik dimata orang untuk berinvestasi di tempat itu. Ini terjadi dimana tingkat bunga lebih tinggi akan meningkatkan minat masyarakat sebagaimana hal ini akan lebih mahal dibandingkan meminjam uang

karena kita paham kita berinvestasi ini dimaksud memberi modal kepada tempat itu dan juga apabila pendapatan yang didapatkan banyak kita akan mendapatkan keuntungan juga.

2. Memperluas dan Memperbanyak Lapangan Pekerjaan

Di jaman modern seperti ini banyak pabrik yang mulai mengurangi pekerja karena sekarang mulai mengganti jasa manusia dengan robot. Karena alasan tersebut pengangguran di Indonesia meningkat. Karena lapangan pekerjaan yang sempit yang membuat tumbuhnya rasa kriminalitas yang tinggi. Karena itu dengan kebijakan moneter ini di harapkan agar semakin banyak jiwa jiwa pengusaha yang pastinya bisa sukses karna kerjasama antar pemerintah dan rakyatnya. Diharapkan agar semakin banyak lapangan pekerjaan.

3. Menciptakan Peningkatan Ekonomi yang Tinggi

Seperti yang tertulis dari awal agar ekonomi mengalami peningkatan semua dari kita sendiri. Tidak mengekspor barang sering-sering. Lebih banyak membeli produk dalam negeri dan juga kita sendiri bisa membuka lapangan pekerjaan. Membuat karya yang bisa seperti batik yang mendunia. Kita lebih sering mengimpor hasil jadi bukan mengimpor barang mentah. Itu akan membuat Indonesia semakin jaya.

4. Memperbaiki dan menjaga kondisi Neraca tetap stabil

Indonesia juga pernah mengalami lumpuhnya keuangan terjadi pada tahun 1997 dan puncaknya pada tahun 1998. Nilai mata uang rupiah anjlok yang juga bisa disebut krisis moneter. Belajar dari tahun tersebut alangkah baiknya untuk menjaga keuangan agar tetap stabil. Yang dimaksud adalah menjaga keuangan tetap stabil walaupun banyak gangguan ekonomi yang terjadi. Karena memang sistem keuangan sangat penting untuk menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Apabila sistem keuangan tidak stabil maka yang terjadi adalah pertumbuhan suatu negara tersebut meningkat.

5. Menjaga Kestabilan Nilai Kurs Mata Uang

Faktor yang paling mempengaruhi kurs mata uang adalah kondisi dari luar negeri. Karena di Indonesia sendiri mendapat pinjaman dengan menjual surat hutang ke luar negeri. Jika tiba-tiba investor menarik dananya nilai uang rupiah bisa anjlok. Karena itu Bank Indonesia menjaga agar semua berjalan kondusif.

6. Menjaga Kestabilan Harga Barang dan Jasa

Pemerintah terutama Bank Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga kestabilan harga agar tidak anjlok. Karena kalau memang anjlok yang terjadi adalah mata uang rupiah akan jatuh dan tidak ada harganya di mata asing. Sebelum itu terjadi jadi dibutuhkan kerjasama antara

pemerintah dan rakyat untuk menjaga stabilitas harga barang dan terutama jasa karena walaupun secanggih apa sekarang dengan robot sekalipun. Semua atau bidang yg lain pasti membutuhkan jasa manusia.

7. Menurunkan Inflasi

Menurut Bank Indonesia harga akan cenderung naik secara terus menerus saat terjadinya inflasi. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya permintaan untuk mengekspor barang, bahkan di pemerintah yang memiliki permintaan yg banyak. Dan juga uang yang beredar tidak sesuai dengan kebutuhan.

E. Penyebab Terjadinya Kebijakan Moneter

Kita pasti tau tentang krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998. Pada saat itu nilai mata uang benar-benar dibawah, semua harga barang naik yang bisa disebut inflasi karena naik secara terus menerus. Dan juga para investor yg seharusnya berinvestasi kepada negara tapi memilih untuk berinvestasi dengan luar negeri itu semakin membuat negara jatuh perekonomiannya karena tidak adanya pemasukkan dari investor. Pada saat itu juga melemahnya sistem perbankan. Karena itu semakin banyak bank bank bermunculan pada tahun itu dan juga manajerial bank dan apapun yg berada dalam bank tersebut masih belum diawasi dengan ketat. Karena dengan semua masalah yang terjadi alasan terbuatnya kebijakan moneter ini.

F. Kerangka kebijakan Moneter di Indonesia

Bank Indonesia sebagai Bank utama di Indonesia membuat dan menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF). Adanya kerangka ini menjadikan bank Indonesia lebih terarah menuju targetnya. Kerangka ini mulai dijalankan pada Juli 2005. Apa yang dimaksud dengan ITF? ITF ditandai dengan pengumuman kepada publik akan target inflasi yang akan dicapai untuk tahun mendatang yang ditetapkan oleh pemerintah.

Karena inflasi yang rendah terutama stabil adalah tujuan kebijakan moneter. Sebelumnya BI menggunakan kebijakan moneter dengan menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran kebijakan ini. Kebijakan moneter ditandai dengan akuntabilitas kebijakan kepada publik dan bersifat transparansi. Berdasarkan operasionalnya kebijakan moneter ini dilihat dari penetapan suku bunga kebijakan yang menjadi harapan akan mempengaruhi suku bunga pasar, suku bunga deposito dan juga suku bunga kredit perbankan. Karena dari semua suku bunga ini maka yang berakhir adalah hasil akhir dan inflasi.

Bisa disimpulkan ini semua bertujuan untuk menjaga inflasi agar tetap stabil dan tepat sasaran. Sebuah definisi dari definisi tertentu seperti Indeks harga konsumen, dan dalam kisaran yg diinginkan. Cara mencapai target inflasi yang diinginkan adalah dengan cara melalui penyesuaian berkala kepada bank sentral khususnya suku bunga target. Tingkat

bunga dilihat dari tingkat antar bank dimana bank akan meminjamkan semalam untuk keperluan kas.

Target suku bunga dipertahankan menggunakan pasar terbuka menurut jangka waktu tertentu. Cara mempertahankan konstan suku bunga pun memiliki durasi bervariasi antara bulan dan tahun. Biasanya target suku bunga akan ditinjau tiap bulan atau kuartalan oleh komite kebijakan. Perubahan suku bunga dibuat untuk tanggapan berbagai indikator pasar dalam upaya memprediksi tren ekonomi agar pasar tetap pada jalurnya dan mencapai inflasi yang ditetapkan.

G. Jalur Pembuatan Keputusan Kebijakan Moneter

Apabila kebijakan yang dibuat untuk perekonomian Indonesia, kebijakan itu akan dibuat oleh Gubernur Bank Indonesia. Setelah pembuatan kebijakan itu selesai oleh Gubernur Bank Indonesia akan meminta persetujuan oleh Dewan Moneter yang beranggotakan antara lain Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri. Setelah itu dewan moneter akan berunding akan kebijakan yang dibuat dalam mengatasi masalah yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Jadi kesimpulannya kebijakan apapun yang berhubungan dengan perekonomian Indonesia tidak boleh dibuat main-main, yang memiliki hak atas membuat adalah Gubernur Bank Indonesia. Dan juga tidak boleh langsung di sahkan harus di tunjukkan kepada dewan moneter agar dirundingkan dan menjadi suatu kebijakan.

H. Mekanisme Kebijakan Moneter

Pasti selalu ada gangguan di dalam perekonomian dimanapun itu pasti ada gangguan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Bahkan kita bisa menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali gangguan yang terjadi dalam dunia perekonomian di Indonesia terutama yang menjadi topik perbincangan hangat yaitu Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter (MTKM). Para praktisi di Bank sentral bahkan para akademis menjadikan topik ini sebagai bahan perdebatan dan perbincangan.

Sejujurnya Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter ini memberikan dan mengutarakan penjelasan akan bagaimana perubahan instrumen instrumen dari kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi variabel makro maupun variabel mikro hingga tersusun dan tercapainya sasaran kebijakan moneter yang dibuat. Semua ini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Karena sangat besar pengaruhnya terhadap harga dan kegiatan di sektor riil. Jadi karna itu semua sangat bergantung pada respon bank indonesia maupun aparat usaha lainnya terhadap shock kebijakan moneter yang bisa kita sebut dengan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (rSBI).

Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter ini memiliki pengertian yaitu proses bagaimana kebijakan moneter ini dapat mempengaruhi tumbuhnya ekonomi dan juga inflasi. Bagaimana kita tahu tentang efektivitasnya. Efektivitas mekanisme

transmisi kebijakan ekonomi dibagi menjadi dua indikator:

1. Berapa besar kecepatan yang diberikan serta seberapa lama waktu atau tenggat waktu.
2. Berapa kekuatan semua variabel dalam menghadapi shock instrumen kebijakan moneter dan bagaimana mewujudkannya agar tepat pada sasaran yang diinginkan.

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang secara langsung dipegang, diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah. Karena yang kita tau dampak kebijakan moneter ini sangat berpengaruh pada dunia perekonomian di Indonesia. Melalui semua instrumen (Operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, cadangan minimum dan himbauan moral) serta beberapa indikator ekonomi seperti tingkat bunga, jumlah uang yang beredar. Bagaimana cara melihat kebijakan moneter?. Kebijakan ini dapat dilihat dari perubahan pendapatan nasional (GDP), pertumbuhan inflasi, jumlah pengangguran dan peningkatan neraca pembayaran. Dan juga kebijakan pemerintah yang lainnya yang menjadi indikator perekonomian di Indonesia.

Indikator perekonomian Indonesia juga tidak jauh dari jumlah uang yang beredar. Pasti saling terhubung karena tentu saja dibuatnya kebijakan moneter untuk menjaga jumlah uang yang beredar. Karena saat mengalami anjlok maupun peningkatannya akan sangat terlihat karena memiliki dampak yang sangat besar di perekonomian

Indonesia. Dampak ini terjadi melalui beberapa jalur yaitu, :

1. Jalur Biaya Modal
2. Jalur Kekayaan
3. Jalur Harga Relatif
4. Jalur Langsung

Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter dilihat dari perubahan BI Rate sampai bisa mempengaruhi inflasi yang ada. Mekanisme ini bisa terjadi melalui beberapa interaksi akan bank sentral Indonesia, perbankan dan sektor keuangan serta sektor riil. Dengan mekanisme ini gambar tentang tindakan Bank Indonesia dalam perubahan instrumen-instrumen moneter dan target operasional nya tercapai mempengaruhi beberapa variabel mikro maupun makro dan keuangan yang beredar dapat mempengaruhi ke tujuan akhir inflasi dapat terlihat. Karena kembali ke awal ini semua dibuat transparansi.

I. Jalur Mekanisme Kebijakan Moneter Paradigma Lama dan Paradigma Baru

Paradigma lama yang mengendalikan kebijakan moneter beranggapan bahwa otoritas moneter dapat secara langsung mengendalikan keuangan primer, dapat berasumsi bahwa income velocity yang relatif stabil dan juga otoritas moneter dapat dikendalikan dan memenuhi target sesuai sasaran. Menjaga dan mengawasi dengan ketat kebijakan ini memang sangat berat karena benar-

benar berhubungan dengan dasar dari sistem pengendalian moneter bisa dilihat dari sisi teoritis dan empiris dan juga bagaimana jalannya operasional yang terjadi.

Karena ini termasuk tugas yang berat di Indonesia karna juga berhubungan dengan keuangan jadi sampai sekarangpun penelitian secara teoritis dan empiris dan juga masih bertukar serta pendapat tentang bagaimana menjalankan kebijakan tersebut. Dalam berbagai literatur ekonomi-moneter , pada dasarnya terdapat empat jalur transmisi utama yang menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian (Mishkin, 1995, Boediono, 1996, dan BIS 1995) . antara lain Jalur suku bunga, jalur nilai tukar, jalur harga aset dan jalur kredit.

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa uang laju yang beredar, inflasi, dan laju pertumbuhan ekonomi menjadi berhubungan tapi melemah karena reformasi di Indonesia. Dan sebaliknya yang terjadi jumlah uang yang beredar mempengaruhi kegiatan ekonomi. Dan juga merupakan arus balik keuangan primer. Karna itu paradigma lama yang mengungkapkan bahwa jumlah maupun kuantitas uang yang beredar dapat dikendalikan sepenuhnya atas otoritas moneter menjadi tidak berlaku.

Karena semakin berkembangnya peran pasar yang memmbuat perekonomian terutama kebijakan moneter melalui harga uang atau suku bunga. Paradigma ini juga tidak terlepas dari majunya sektor keuangan yang memiliki beberapa karakteristik

antara lain majunya inovasi produk keuangan, proses sekuritisasi, dan juga decoupling antara sektor moneter dengan sektor riil. Uang menjadi hal yang lumrah untuk diperdagangkan. Karena itu dari investasi maupun kegiatan dalam perekonomian secara menyeluruh.

Paradigma baru memiliki keyakinan bahwa jalan utama transmisi dalam perekonomian yaitu jalur suku bunga dan juga jalur nilai tukar. Tapi paradigma baru ini juga tidak memandang rendah jalur kredit. Cuma bukan jalan utama seperti jalur suku bunga maupun jalur nilai tukar. Tapi ini juga merupakan dampak lanjutan dari perubahan suku bunga maupun dan nilai tukar. Dan ada juga jalur aset yang dimiliki oleh pemerintah yang jarang diketahui, di antara lain :

1. Suku bunga pada dasar uang rupiah
2. Nilai tukar kepada valuta asing
3. Harga saham pada pasar modal

Dampak dari kebijakan moneter terhadap kestabilan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi bergantung kepada seberapa kuat hubungan yang terjadi antara perubahan kebijakan moneter dan juga kegiatan ekonomi yang dilakukan selain itu jangka waktu yang diberikan saat terjadinya perubahan kebijakan ekonomi dan sampai kita tau kapan terjadinya efek terhadap kegiatan ekonomi. Ada juga waktu yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengumpulkan data data ekonomi dan juga hasil analisa perubahan aktivitas ekonomi yang terjadi yang dapat dilaksanakan oleh kebijakan moneter.

Seperti contoh saat banyaknya pengangguran di Indonesia, karena itu dengan mengatasi pengangguran, Bank Indonesia akan memerlukan waktu dan juga mengumpulkan data yang memiliki hubungan dengan pengangguran yang terjadi. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter ini mempunyai jalur Kebijakan moneter yang benar untuk meningkatkan pendapatan dan juga inflasi yang tepat sasaran.

Jalur dalam Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter ini dibagi menjadi 6, antara lain :

1. Jalur MTKM melalui jalur suku bunga

Di mekanisme kebijakan moneter ini menekankan bahwa peranan perubahan suku bunga di sektor keuangan. Suku bunga pendek di transmisikan kepada suku bunga yang panjang yang memiliki dampak pada permintaan dan juga pada akhirnya akan berpengaruh pada inflasi. Transmisi di suku keuangan memerlukan tenggat waktu tertentu karena perubahan kebijakan moneter ini berawal dari perubahan instrumen moneter yang kemudian berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga.

Transmisi dari sektor keuangan ke sektor riil juga berpengaruh terhadap konsumsi dan investasi. Alasan ini terjadi dikarenakan suku bunga deposito yang merupakan pendapatan dari masyarakat dan suku bunga kredit yang juga sebagai pembiayaan konsumsi. suku bunga

terhadap investasi dilihat dari suku bunga kredit yang merupakan komponen biaya modal.

Apabila perekonomian di Indonesia mulai turun maka yang dilakukan Bank Indonesia adalah menggunakan kebijakan dengan menurunkan suku bunga untuk mendorong aktivitas perekonomian. Dan dampak yang terjadi adalah permintaan kredit semakin banyak dan meningkat. Dan apabila inflasi mulai meningkat Bank Indonesia akan merespon dengan cara menaikkan suku bunga BI Rate untuk menekan dan menahan aktifitas perekonomian agar mulai mengurangi terjadinya inflasi.

Pengaruh suku bunga terhadap konsumsi dan investasi bisa dilihat karena memiliki dampak jumlah permintaan agrerat. Jika permintaan tidak dibarengi dengan penawaran yang terjadi adalah output gap.

2. Jalur MTKM Melalui Jalur Saluran Uang
3. Jalur MTKM Melalui Saluran Kredit

Jalur kredit juga memiliki peranan dalam mekanisme perekonomian di Indonesia. Perubahan ini bisa terlihat dari perubahan perilaku Bank dan juga menyalurkan kreditnya kepada nasabah. Pengetatan moneter membuat menurunnya nilai jaminan kredit yang didapatkan oleh bank. Resiko yang akan dihadapi menjadi meningkat dan bank sebagai pelaku harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

4. Jalur MTKM Melalui Saluran Nilai Tukar Uang

Nilai tukar uang sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia karena tukar uang rupiah juga merupakan mekanisme dalam perekonomian serta selalu menjadi perbincangan hangat entah karena rupiah yang naik atau karena rupiah yang anjlok. Perubahan suku bunga BI Rate juga mempengaruhi nilai tukar uang. Mekanisme ini disebut juga jalur nilai tukar. Kenaikan BI Rate akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Negara Indonesia dengan suku bunga Luar Negeri.

Dampak dari selisih ini bisa membuat banyak investor asing yang mulai berinvestasi di Indonesia. Aliran modal yang masuk ini akan membuat nilai uang Rupiah di apresiasi. Karena ini barang impor akan semakin meningkat dan juga barang ekspor akan semakin mahal karena itulah menguntungkan Indonesia agar semakin meningkatnya barang impor dan juga menurunkan barang ekspor

5. Jalur MTKM melalui Jalur Saluran Harga Aset dan Saluran Ekspetasi

Pengaruh kebijakan ini melalui pergeseran portofolio investasi yang dimiliki oleh masyarakat. Kebijakan ini akan mempengaruhi dana dalam para pelaku ekonomidan relokasi jenis aset satu ke aset yang lainnya yang dalam portofolio tersebut berbentuk aset. , pengetatan moneter ini membuat suku bunga menjadi meningkat yang

berakibat para pelaku ekonomi akan lebih suka memegang sebuah aset dalam bentuk obligasi maupun deposito daripada berbentuk seperti saham. Minat pengusaha akan riil menjadi berkurang yang membuat laju perekonomian menurun dengan drastis.

J. Peran Bank Indonesia Terhadap Kebijakan Moneter

Tujuan Bank Indonesia tentu saja untuk menjaga dan mengawasi keuangan agar tetap stabil dan tetap pada porosnya dengan mencapai target dan juga tepat sasaran. Bagaimana kita bisa melihat itu? Kita bisa melihat pada inflasi yang terjadi apakah meningkat atau tetap stabil .inflasi yang stabil terjadi karena harga barang dan jasa juga stabil. Untuk mencapai tujuan untuk menstabilkan perekonomian Indonesia jadi pada tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan cara menjadikan inflasi sebagai sasaran utama dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang.

Alasan bank Indonesia melakukan ini untuk mengurangi volatilitas nilai tukar uang yang berlebihan, bukan dengan mengarahkan nilai tukar keuangan pada level tertentu. Dalam melaksanakan ini semua, bank indonesia memiliki wewenang melalui kebijakan moneter dengan melalui penetapan sasaran-sasaran moneter yang pasti memiliki tujuan menjaga laju inflasi yang ditetapkan langsung oleh pemerintah. Secara langsung, pengendalian sasaran kebijakan moneter tersebut dilihat dengan menggunakan beberapa instrumen,

diantaranya adalah operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, penetapan cadangan wajib dan juga kebijakan moral.

K. Hal-hal yang Perlu di Perhatikan Dalam Kebijakan Moneter

1. Inflasi Penargetan

Berdasarkan Bank Indonesia sebagai bank utama di Indonesia yang menetapkan Inflasi sebagai sasaran utama yang harus dijaga, diawasi dan dikendalikan. Definisi tertentu yang dimaksud adalah seperti indeks harga konsumen dalam kisaran harga yang diinginkan. Cara mencapai target inflasi ini dengan melakukan penyesuaian suku bunga berkala kepada bank sentral. Pada umumnya tingkat bunga yang diinginkan adalah tingkat antara bank yang satu akan meminjamkan bank yang lain untuk keperluan arus kas agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana negara menggunakan tingkat bunga tertentu.

Cara agar target suku bunga menggunakan jangka waktu tertentu dengan cara menggunakan operasi pasar terbuka. Suku bunga ini harus konstan dan juga bervariasi antar bulan bahkan ke tahun. Biasanya ditinjau oleh komite kebijakan. Perubahan suku bunga kebijakan moneter ini dibuat sebagai tanggapan indikator pasar dalam upaya memperkirakan beberapa trend ekonomi dan uga pasar agar tetap dan mempertahankan inflasi agar stabil.

2. Harga Penargetan Meningkat

Harga penargetan meningkat ini memiliki sasaran dan tercapai dalam waktu ke waktu, yang lebih tepatnya yaitu tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam target inflasi ini terjadi pada tahun tahun terakhir tidak diperhitungkan dan disesuaikan untuk masa depan perekonomian di Indonesia

3. Agrerat Moneter

Tahun 1980, sebagian negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan jumlah uang yang beredar di pasaran. Pendekatan ini menghasilkan jawaban yaitu memasukan kelas berbeda antara uang dan kredit. Kebijakan ini berfokus kepada sinyal harga dari pasar satu dengan pasar lainnya, difokuskan pada jumlah moneter.

4. Nilai Tukar Tetap

Kebijakan ini dibuat untuk mempertahankan nilai mata uang rupiah di mata asing. Pemerintah daerah atau otoritas daerah menyatakan bahwa nilai tukar tetap tapi tidak aktif membeli atau menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat.

Mata uang ditinjau oleh Bank sentral untuk dijual dan dibeli setiap hari untuk mencapai target nilai tukar. Dibawah sistem ini di bawah oleh dewan mata uang setiap unit mata uang lokal yang didukung oleh unit mata uang asing. Tujuan

melakukan ini untuk memastikan bahwa basis moneter lokal tidak berkembang tanpa didukung oleh mata uang keras dan menghilangkan berbagai macam kekhawatiran tentang jalannya mata uang lokal dengan mengkonversi mata uang lokal ke mata uang keras.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE, Yogyakarta, 1982.
- Djojohdikusumo, Soemitro, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1993.
- Kartili, J.A., Prof. Dr., Sumber Daya Alam, untuk pembangunan nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983.
- Santoso, Budi, "Dinamika dan Pertumbuhan Ekonomi rakyat dalam Perspektif Strategi Pembangunan", dalam Daya Saing Perekonomian Indonesia Menyongsong Era Pasar Bebas, Diterbitkan dalam rangka Dies Natalis Universitas Trisakti ke-31, Media Ekonomi Publisng (MEP).
- Sjahrir, "Kemiskinan, Keadilan dan Kebersamaan", Makalah pada Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Ke-13, Medan, 1996.
- Suroso, P.C., Perekonomian Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa, Gramedia, Jakarta, 1994.
- Sutjipto, E. "Suatu Ikhtisar Lembar Pengajaran Wawasan Nusantara", dalam Bunga Rampai Wawasan Nusantara I, LEMHANAS, 1981.
- Tambunan, Tulus T.H., Perekonomian Indonesia, Ghalia Indonesia, 1996.

